



Katalog BPS : 9302002.64

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KALIMANTAN TIMUR MENURUT PENGGUNAAN

*Gross Regional Domestic Product of Kalimantan Timur
by Expenditure*

2005-2010



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KALIMANTAN TIMUR MENURUT PENGGUNAAN**

*Gross Regional Domestic Product
of Kalimantan Timur By Expenditure*

2005 - 2010

ISSN 1907 - 1876

Nomor Publikasi/ Publication Number : 64.550.11.002

Katalog BPS/ BPS - Catalogue : 9302002.64

Ukuran Buku/ Book Size : 25,7 cm x 18,2 cm

Jumlah Halaman/ Page : 94 Halaman

Naskah/ Script :

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Regional Account and Statistical Analysis Division

Diterbitkan Oleh/ Published by :

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

BPS - Statistics of Kalimantan Timur Province

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

May be cited with reference to the source

ISSN 1907-1876



9 771907 187682

KATA PENGANTAR

Buku *Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Timur menurut Penggunaan Tahun 2005 – 2010*, merupakan pasangan dari publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Timur menurut Lapangan Usaha, yang diterbitkan secara berkala setiap tahun.

Jika dalam publikasi PDRB menurut Lapangan Usaha diperoleh gambaran struktur perekonomian, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan sebagainya, maka dalam publikasi PDRB menurut Penggunaan diperoleh gambaran mengenai produk domestik regional yang diuraikan dalam komponen-komponen pengeluaran. Komponen-komponen tersebut adalah Konsumsi Rumah tangga, Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto, Perubahan Inventori, serta komponen Ekspor dan Impor.

Adapun data yang dipakai dalam penghitungan komponen-komponen PDRB menurut Penggunaan diperoleh dari dinas/instansi/lembaga pemerintah maupun pihak swasta, juga data yang bersumber dari hasil sensus dan survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur. Diharapkan publikasi ini akan membantu pihak perencana daerah, para analis, serta lembaga/instansi pemerintah lainnya maupun pihak swasta.

Disadari dalam penerbitan kali ini, masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu mendapat penyempurnaan pada penerbitan yang akan datang. Dengan demikian saran dan kritik dari berbagai pihak selalu kami harapkan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu sehingga publikasi ini dapat diterbitkan, diucapkan terima kasih.

Samarinda, Juli 2011
BADAN PUSAT STATISTK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
K e p a l a,

Drs. Johnny Anwar
NIP. 19540610 197703 1 002



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	<i>i</i>
DAFTAR ISI	<i>ii</i>
DAFTAR TABEL	<i>iv</i>
DAFTAR GRAFIK ..	<i>vi</i>
DAFTAR LAMPIRAN ..	<i>vii</i>
BAB I. PENDAHULUAN	2
A. Umum	2
B. Pengertian Mengenai PDRB Menurut Penggunaan	3
C. Publikasi	4
BAB II. METODE PENGHITUNGAN PDRB MENURUT PENGGUNAAN	7
2.1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	7
2.2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)	24
2.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	34
2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	40
2.5. Perubahan Inventori	45
2.6. Ekspor dan Impor Barang dan Jasa	50
BAB III. TINJAUAN PDRB MENURUT PENGGUNAAN	56
BAB IV. PERKEMBANGAN RINCIAN KOMPONEN PDRB KALIMANTAN TIMUR MENURUT PENGGUNAAN TAHUN 2005 – 2010	62
4.1. Konsumsi Rumahtangga	62
4.2. Konsumsi Lembaga Nonprofit Yang Melayani Rumahtangga (LNPRT)	65
4.3. Konsumsi Pemerintah	66



4.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	67
4.5. Perubahan Inventori	68
4.6. Ekspor	69
4.7. Impor	71

BAB V. AGREGAT PDRB MENURUT PENGGUNAAN DAN PENDAPATAN REGIONAL KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2005 – 2010	74
5.1. PDRB per kapita dan Pendapatan Regional per kapita ..	74
5.2. Perbandingan Ekspor terhadap PMTB	75
5.3. Perbandingan PDRB terhadap Ekspor dan Impor	76
5.4. Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan	78
5.5. Neraca Perdagangan	79
5.6. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	81
DAFTAR ISTILAH PENTING	85
LAMPIRAN (Tabel-tabel)	88



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur (ADHB) Menurut Komponen Penggunaan, Tahun 2005–2010	57
Tabel 2.	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur (ADHK 2000) Menurut Komponen Penggunaan, Tahun 2005–2010	57
Tabel 3.	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur (ADHB) Menurut Komponen Penggunaan, Tahun 2005 – 2010	59
Tabel 4.	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur (ADHK 2000) Menurut Komponen Penggunaan, Tahun 2005 – 2010	60
Tabel 5.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga, Tahun 2005 – 2010	63
Tabel 6	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga, Tahun 2005 – 2010	64
Tabel 7.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit, Tahun 2005 – 2010	65
Tabel 8.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah, Tahun 2005 - 2010	66
Tabel 9.	Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2005 – 2010	67
Tabel 10.	Perkembangan Perubahan Inventori, Tahun 2005 – 2010	69
Tabel 11.	Perkembangan dan Struktur Ekspor, Tahun 2005 – 2010	70
Tabel 12.	Perkembangan dan Struktur Impor, Tahun 2005 – 2010	71
Tabel 13.	PDRB per kapita dan Pendapatan per kapita Kalimantan Timur, Tahun 2005 – 2010	75
Tabel 14.	Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB), Tahun 2005 – 2010 ...	76
Tabel 15.	Rasio PDRB terhadap Ekspor dan Impor , Tahun 2005–2010	77



Tabel 16. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Tahun 2005–2010	78
Tabel 17. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa, Tahun 2005 – 2010 ..	80
Tabel 18. ICOR Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2005 – 2010	83

<https://kaltim.bps.go.id>



DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1. PDRB Prov. Kaltim (ADHB) Menurut Komponen Penggunaan, Tahun 2005 – 2010	56
Grafik 2. PDRB Prov. Kaltim (ADHK 2000) Menurut Komponen Penggunaan, Tahun 2005 – 2010	58
Grafik 3. Distribusi PDRB Prov. Kaltim (ADHB) Menurut Komponen Penggunaan, Tahun 2005 – 2010	59
Grafik 4. Pertumbuhan PDRB Prov. Kaltim (ADHK 2000) Menurut Komponen Penggunaan, Tahun 2005 – 2010	60



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Tabel	1. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur menurut Penggunaan, Tahun 2005 - 2010 (Jutaan Rupiah)...	89
Tabel	2. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur menurut Penggunaan, Tahun 2005 - 2010 (Persen)	90
Tabel	3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur menurut Penggunaan, Tahun 2005 - 2010 (Persen)	91
Tabel	4. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur menurut Penggunaan, Tahun 2005 - 2010 (Tahun 2000 = 100)	92
Tabel	5. Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur menurut Penggunaan, Tahun 2005 - 2010 (Tahun Sebelumnya = 100)	93
Tabel	6. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur menurut Penggunaan, Tahun 2005 - 2010 (Harga Berlaku terhadap Harga Konstan)	94



BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu pendekatan produksi (*production approach*), pendekatan pendapatan (*income approach*), dan pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*). Nilai PDRB yang dihitung melalui pendekatan produksi menjelaskan bagaimana PDRB dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi yang beroperasi di suatu wilayah. Penghitungan PDRB yang demikian disebut sebagai PDRB menurut sektor atau biasa disebut sebagai PDRB dari sisi penyediaan (*supply side*). Nilai PDRB yang dihitung melalui pendekatan pengeluaran menjelaskan bagaimana PDRB suatu wilayah digunakan atau dimanfaatkan, baik untuk memenuhi permintaan domestik di suatu wilayah maupun untuk memenuhi kebutuhan penduduk di luar wilayah tersebut. Nilai PDRB yang demikian disebut PDRB menurut penggunaan atau menurut pengeluaran (*Gross Domestic Regional Product by Expenditure*), atau disebut juga sebagai PDRB dari sisi permintaan (*demand side*).

Permintaan domestik dapat berupa konsumsi rumahtangga, konsumsi lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, dan pembentukan modal tetap bruto. Sedangkan permintaan dari luar wilayah domestik berupa ekspor. Namun, karena untuk memenuhi permintaan terhadap barang dan jasa dari suatu wilayah belum mencukupi, maka dipenuhi dari luar wilayah (impor). Dalam PDRB menurut penggunaan, ekspor barang dan jasa dikurangi dengan impor barang dan jasa disebut dengan ekspor neto. Selisih antara permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) yang mencerminkan perbedaan statistik (*statistical discrepancy*) dicakup dalam perubahan inventori (*change in inventories*).



Penyusunan publikasi PDRB Provinsi Kalimantan Timur menurut Penggunaan disebabkan oleh semakin meningkatnya kebutuhan data tentang komponen PDRB penggunaan, misalnya mengenai pengeluaran konsumsi rumahtangga baik berupa konsumsi makanan maupun non makanan juga pengeluaran konsumsi pemerintah baik berupa pengeluaran aparatur maupun pelayanan publik. Hal yang juga penting perkembangan data investasi fisik (PMTB) hingga ekspor hasil SDA Kalimantan Timur. Informasi yang disajikan tersebut diharapkan dapat membantu pembaca, terutama para peneliti, sehingga lebih dapat memahami kondisi perekonomian Kalimantan Timur dari sisi permintaan.

Dalam publikasi ini juga disajikan beberapa indikator ekonomi makro yang dihasilkan dari perhitungan PDRB menurut penggunaan, seperti besaran *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)* dan *rasio ekspor terhadap PDRB*. Pembahasan dimulai dengan tinjauan PDRB Provinsi Kalimantan Timur menurut penggunaan secara agregat, dan selanjutnya pada bagian akhir diberikan suatu kesimpulan dari uraian sebelumnya. Adapun cakupan periode pembahasan adalah selama periode tahun 2005 – 2009, dan status data tahun 2009 adalah angka sangat sementara.

B. PENGERTIAN MENGENAI PDRB MENURUT PENGGUNAAN

PDRB menurut penggunaan disebut juga sebagai PDRB menurut permintaan atau PDRB menurut pengeluaran. *Dilihat dari sisi permintaan*, PDRB merupakan jumlah seluruh nilai akhir barang jadi dan jasa (*output*) yang diproduksi di suatu daerah/wilayah selama periode waktu tertentu. Yang dimaksud dengan barang jadi adalah barang yang tidak digunakan untuk diproses kembali oleh suatu industri, tetapi untuk dikonsumsi oleh penduduk. Barang setengah jadi (*intermediate goods*) tidak termasuk dalam penghitungan PDRB, karena barang setengah jadi digunakan untuk diproses



kembali menjadi barang jadi, sehingga nilai barang setengah jadi tersebut sudah termasuk di dalam barang jadi yang dihasilkan.

Sedangkan dari sisi pengeluaran, PDRB merupakan jumlah seluruh pengeluaran (*expenditure*) yang dilakukan oleh seluruh institusi pada suatu daerah/wilayah selama satu tahun. Institusi-institusi tersebut terdiri atas rumahtangga, perusahaan dan pemerintah. Dengan demikian, sesuai dengan konsep ekonomi makro, PDRB menurut penggunaan terbagi menjadi empat kelompok pengeluaran utama, yaitu pengeluaran untuk konsumsi rumahtangga, pengeluaran untuk kegiatan investasi, pengeluaran/belanja sektor pemerintahan dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Penghitungan PDRB menurut penggunaan disajikan dalam dua bentuk yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000. Penghitungan atas dasar harga berlaku adalah penghitungan terhadap semua komponen PDRB yang dinilai atas dasar harga masing-masing tahun. Sedangkan atas dasar harga konstan 2000 adalah penghitungan terhadap semua komponen PDRB yang dinilai berdasarkan harga tahun dasar yaitu tahun 2000.

Penghitungan PDRB Provinsi Kalimantan Timur menggunakan harga berlaku menjelaskan tentang perkembangan nilai nominal PDRB Provinsi Kalimantan Timur, yang selain dipengaruhi oleh perkembangan kuantitas permintaan juga dipengaruhi oleh perkembangan harga. Sedangkan dengan harga konstan, pengaruh perubahan harga sudah dihilangkan dari penghitungan PDRB, sehingga nilai PDRB atas dasar harga konstan merupakan perkembangan riil dari PDRB pada suatu periode waktu tertentu.

C. PUBLIKASI

Penerbitan publikasi PDRB, selain PDRB menurut penggunaan, juga dilengkapi dengan publikasi PDRB menurut lapangan usaha/sektor ekonomi.



Dengan demikian ada dua jenis publikasi yang diterbitkan setiap tahunnya, yaitu:

1. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan

Publikasi ini diterbitkan dalam susunan yang sama dengan publikasi PDRB menurut lapangan usaha. Perbedaannya pada rincian, yaitu lapangan usaha diganti dengan komponen penggunaan. Komponen tersebut adalah: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto, Perubahan Inventori dan Ekspor Neto (Ekspor dikurangi Impor).

2. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha

Publikasi ini berisi tabel-tabel nilai tambah bruto sektoral, laju pertumbuhan, distribusi persentase dan PDRB per kapita, atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2000. Penyajian dibedakan menurut PDRB migas dan nonmigas.



BAB II METODE PENGHITUNGAN PDRB MENURUT PENGGUNAAN

Pembahasan dalam bagian ini dimulai dengan beberapa definisi dasar dan diuraikan secara lengkap mengenai konsep, definisi, serta metodologi yang digunakan dalam penghitungan komponen-komponen PDRB Menurut Penggunaan.

2.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

2.1.1. Konsep dan Definisi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup semua pengeluaran atau pembelian barang dan jasa yang tujuannya hanya untuk dikonsumsi, dikurangi dengan hasil penjualan neto dari barang bekas atau apkrin dalam suatu periode tertentu. Selain pembelian untuk bahan makanan, pakaian, bahan bakar, barang tahan lama dan jasa-jasa, pengeluaran konsumsi rumah tangga termasuk juga pembelian barang yang tidak ada duanya (tidak diproduksi kembali) seperti karya seni, barang antik. Pengeluaran untuk rumah yang ditempati seperti sewa rumah, perbaikan kecil rumah, rekening air, listrik, telepon, dan lain-lain merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga, sedangkan pembelian rumah tidak termasuk pengeluaran konsumsi.

Dalam SNA'93 (*The System of National Accounts 1993*) pengertian pengeluaran konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi:

1. Pengeluaran konsumsi akhir, dan
2. Konsumsi akhir aktual



Konsep pengeluaran konsumsi akhir mengacu pada pengeluaran rumah tangga atas konsumsi barang dan jasa. Sebaliknya, konsumsi akhir aktual mengacu pada akuisisi konsumsi barang dan jasanya. Perbedaan antara kedua konsep ini pada perlakuan barang dan jasa tertentu yang dibiayai oleh pemerintah dan/atau LNPRT (lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga) untuk keperluan konsumsi rumah tangga sebagai bentuk transfer sosial dan sejenisnya.

Untuk lebih jelasnya, konsep dari keduanya adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran Konsumsi Akhir didefinisikan sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran yang diperoleh unit-unit institusi residen atas barang dan jasa yang digunakan untuk kepuasan langsung kebutuhan, keinginan individu atau kebutuhan kolektif anggota suatu komunitas. Pengeluaran konsumsi akhir bisa berada di wilayah domestik atau luar negeri. Dengan kata lain, pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah pengeluaran konsumsi akhir (*aktual*) rumah tangga ditambah subsidi dan transfer barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga, baik yang berasal dari pemerintah maupun LPNRT.
2. Pengeluaran Konsumsi Akhir *Aktual* Rumah Tangga didefinisikan sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup semua pengeluaran atau pembelian barang dan jasa yang tujuannya hanya untuk dikonsumsi dikurangi dengan hasil penjualan neto dari barang bekas atau apkiran dalam suatu periode tertentu. Selain pembelian untuk bahan makanan, pakaian, bahan bakar, barang tahan lama dan jasa-jasa, pengeluaran konsumsi rumah tangga termasuk perhiasan, tetapi tidak termasuk pembelian barang yang tidak ada duanya (tidak diproduksi kembali) seperti karya seni dan barang antik (*valuable things*).

Pengeluaran untuk rumah yang ditempati seperti sewa rumah, perbaikan kecil rumah, rekening air, listrik, telepon, dan lain-lain



merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga, sedangkan pembelian rumah tidak termasuk pengeluaran konsumsi. Pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk pembelian alat-alat kerja, seperti buruh tambang membeli sekop, linggis, lampu senter yang ditanggung perusahaan, maka pengeluaran ini tidak termasuk konsumsi rumah tangga dari buruh tambang, tetapi merupakan biaya antara perusahaan tambang tempat buruh bekerja.

2.1.2. Ruang Lingkup

Dalam penghitungan pengeluaran konsumsi rumah tangga menggunakan pendekatan penduduk. Namun demikian, konsumsi rumah tangga dapat juga dihitung dengan menggunakan pendekatan wilayah. Dalam SNA'93, konsep penduduk yang dipakai adalah jumlah penduduk selama satu tahun, sedangkan konsep penduduk yang biasa digunakan untuk menghitung konsumsi seluruh penduduk adalah penduduk pertengahan tahun yang diperkirakan dari Sensus Penduduk.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan konsep wilayah adalah pengeluaran konsumsi yang meliputi seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh anggota rumah tangga baik penduduk wilayah itu sendiri maupun penduduk wilayah lain. Penduduk wilayah lain seperti staf kedutaan asing, staf perwakilan daerah, turis asing dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud pengeluaran konsumsi rumah tangga pada cara kedua adalah pengeluaran yang dilakukan penduduk wilayah itu saja, tidak termasuk pengeluaran penduduk wilayah lain. Dalam konsep termasuk juga pembelian langsung yang dilakukan penduduk wilayah ini yang dilakukan di luar negeri atau di wilayah lain. Oleh karena terbatasnya data, cara yang dapat dipakai untuk menghitung pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah cara kedua.



Kasus batas

Bila dalam memperkirakan konsumsi rumah tangga ada hal-hal yang menimbulkan keragu-raguan, misal penduduk yang sedang melakukan perjalanan ke daerah lain (dalam atau luar negeri) baik dalam rangka bertugas, urusan bisnis atau untuk keperluan lainnya. Biasanya penduduk tersebut mengeluarkan uang untuk memenuhi konsumsinya baik berupa barang (makanan, bukan makanan) ataupun jasa-jasa lainnya. Pengeluaran yang dilakukan selama berada di daerah lain tersebut menurut konsep harus diperhitungkan sebagai impor (barang masuk). Tetapi karena belum tersedianya data yang mencatat berapa jumlah penduduk yang bepergian serta jumlah biaya yang dikeluarkan selama di daerah lain, maka pengeluaran yang semacam ini sudah terhitung di rumah tangganya yaitu melalui konsumsi perkapita. Begitu pula sebaliknya, penduduk dari daerah lain yang berada di daerah tersebut, seharusnya diperlakukan sebagai ekspor, namun karena tidak tersedianya data, maka diasumsikan merupakan konsumsi rumah tangga di daerah asalnya.

Di samping kasus batas di atas, juga perlu diperhatikan kasus batas mengenai barang dan jasa yang dikonsumsi.

- a. Konsumsi akhir rumah tangga meliputi barang dan jasa berikut:
 - i. Jasa tempat tinggal yang ditempati sendiri;
 - ii. Pendapatan dan sejenisnya seperti:
 - barang dan jasa yang diterima sebagai pendapatan dan sejenisnya oleh pekerja
 - barang dan jasa yang diproduksi sebagai output usaha rumah tangga yang digunakan untuk konsumsi oleh anggota rumah tangga. Dalam hal ini seperti makanan dan barang hasil pertanian, jasa perumahan yang ditempati sendiri, dan jasa rumah tangga yang dihasilkan



dengan mempekerjakan pekerja dibayar (PRT, tukang kebun, sopir dsb).

- iii. Item-item yang tidak diperlakukan sebagai konsumsi antara, seperti:
 - material untuk perbaikan kecil dan dekorasi interior tempat tinggal yang dilakukan oleh penyewa atau pemilik;
 - materi untuk perbaikan dan pemeliharaan terhadap barang tahan lama, termasuk kendaraan.
 - iv. Item-item yang tidak diperlakukan sebagai pembentukan modal, khususnya barang tahan lama, yang kontinyu melakukan fungsinya dalam beberapa periode pencatatan; termasuk transfer kepemilikan barang tahan lama dari perusahaan untuk rumah tangga.
 - v. Biaya jasa finansial langsung;
 - vi. Jasa asuransi ;
 - vii. Jasa dana pensiun
 - viii. Pembayaran oleh rumah tangga untuk surat izin (*license*) dan sebagainya yang dipertimbangkan sebagai pembelian jasa-jasa.
 - ix. Pembelian output dengan harga secara ekonomi tidak signifikan, seperti ongkos masuk museum.
- b. Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga tidak termasuk:
- i. transfer sosial dan sejenisnya, seperti pengeluaran yang awalnya dilakukan rumah tangga tetapi setelah itu digantikan oleh lembaga penjamin sosial, seperti biaya kesehatan;
 - ii. item-item yang diperlakukan sebagai konsumsi antara atau



pembentukan modal bruto, seperti:

- pengeluaran-pengeluaran oleh rumah tangga yang memiliki usaha rumah tangga ketika digunakan untuk tujuan usaha, contohnya atas barang tahan lama seperti kendaraan, furnitur atau peralatan elektrik (pembentukan modal tetap bruto), dan juga atas barang-barang tidak tahan lama seperti bahan bakar (konsumsi antara);
 - pengeluaran dekorasi oleh penghuni rumah sendiri, pemeliharaan dan perbaikan tempat tinggal yang tidak khas dilakukan oleh penyewa (diperlakukan sebagai konsumsi antara dalam produksi jasa perumahan);
 - pembelian perumahan (diperlakukan sebagai pembentukan modal tetap bruto);
 - pengeluaran barang berharga (diperlakukan sebagai pembentukan modal tetap bruto).
- iii. item-item yang diperlakukan sebagai akuisisi aset-aset yang tidak diproduksi, khususnya pembelian tanah;
- iv. semua pembayaran oleh rumah tangga yang dipertimbangkan sebagai pajak, seperti surat izin untuk kendaraan sendiri, kapal atau pesawat terbang dan juga surat izin untuk berburu, menembak atau memancing;
- v. sumbangan, kontribusi dan iuran yang dibayarkan rumah tangga kepada LNPRT, serikat dagang, perkumpulan profesional, lembaga konsumen, masjid, gereja dan sosial, budaya, klub rekreasi dan olah raga;
- vi. transfer non-profit atau sejenisnya oleh rumah tangga kepada organisasi amal, fakir miskin dan bantuan.



2.1.3. Sumber Data

Konsumsi rumah tangga datanya bersumber dari hasil Susenas, yaitu rata-rata konsumsi perkapita seminggu (kuantum) untuk kelompok makanan dan rata-rata konsumsi perkapita sebulan (rupiah) untuk kelompok bukan makanan. Disamping itu digunakan juga data lainnya seperti pendapatan perkapita atas dasar harga konstan yang bersumber dari PDRB sektoral (lapangan usaha). Rata-rata harga eceran dan Indeks Harga Konsumen bersumber dari Statistik Harga Konsumen di kota dan pedesaan. Jumlah penduduk pertengahan tahun bersumber dari publikasi Sensus Penduduk, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) dan dari data proyeksi penduduk. Serta data-data lain seperti informasi dari asosiasi dan perusahaan retail.

2.1.4. Metode Penghitungan

Metode penghitungan yang biasa dipakai untuk menghitung besarnya pengeluaran rumah tangga adalah:

1. Metode langsung

Metode langsung ini pada pokoknya adalah untuk memperoleh pengeluaran konsumsi rumah tangga secara keseluruhan dengan cara menggunakan rasio yang diperoleh dari Survei Pengeluaran Rumah Tangga. Data yang dikumpulkan dengan metode ini mengukur arus barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga atas dasar harga pembelian. Pada dasarnya metode ini menyeluruh dalam ruang lingkup barang dan jasa yang diselidiki dan dapat dipakai untuk menganalisa pengeluaran konsumsi rumah tangga, menurut jenis barang dan tujuan pengeluaran. Metode ini memungkinkan klasifikasi data pengeluaran menurut karakteristik rumah tangga seperti tingkat pendapatan atau status ekonominya. Apabila metode ini dipakai, hasil yang akan diperoleh hanyalah pengeluaran konsumsi yang termasuk



pengeluaran langsung didalam wilayah oleh rumah tangga penduduk, sedangkan pengeluaran oleh turis, anggota diplomatik dan lain-lain tidak termasuk dalam survei yang diadakan.

- a. Survei-survei tersebut pada umumnya hanya mencakup sebagian kecil rumah tangga atau hanya ditujukan pada kelompok tertentu dari penduduk saja.
- b. Rumah Tangga khusus biasanya belum tercakup.
- c. Penyimpangan-penyimpangan data yang dikumpulkan dapat terjadi dalam data yang diberikan oleh rumah tangga dan kesulitan-kesulitan yang dapat dipercaya mengenai jenis-jenis pengeluaran terhadap barang yang jarang dibeli atau barang-barang yang terlarang diperjualbelikan.

Data yang dipakai untuk penghitungan konsumsi rumah tangga dengan metode ini adalah Susenas yang dilakukan di daerah perkotaan dan pedesaan. Selain penyimpangan di atas termasuk juga kelemahan Susenas ini adalah konsep yang dipakai agak berbeda dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga yang telah dijelaskan sebelumnya. Pengeluaran konsumsi pada Susenas adalah semua pembelian oleh rumah tangga untuk dikonsumsi, kalau barang yang telah dibeli dijual sebagian atau barang bekas yang dibeli setelah dipakai beberapa lama dijual kembali, tidak tercakup dalam Susenas. Seharusnya yang termasuk konsumsi adalah seluruh barang yang dibeli untuk dikonsumsi langsung, sedangkan barang bekas yang dikonsumsi hanyalah yang benar-benar dipakai atau sebesar selisih harga pembelian dengan harga penjualan. Namun oleh karena data lain tidak tersedia, maka data Susenas dapat juga dipakai dalam penghitungan konsumsi rumah tangga, dan harus dilengkapi dengan data lainnya.



2. Metode Arus Barang dan Jasa

Pendekatan dari segi arus barang dan jasa ini didasarkan atas penyediaan barang dan jasa yang berasal dari produksi domestik dan impor, serta penyaluran barang dan jasa tersebut kepada para pemakai, termasuk kepada rumah tangga. Kalau metode arus barang dan jasa ini digunakan, maka akan diperoleh perkiraan konsumsi rumah tangga berdasarkan konsep pengeluaran rumah tangga di wilayah domestik.

Langkah-langkah dalam memperkirakan pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan memakai metode arus barang dan jasa adalah sebagai berikut:

- a. Persediaan (*supply*) barang dan jasa yang berasal dari produksi dalam negeri dan dari impor yang dinilai atas dasar harga pembelian, masing-masing dipisahkan menurut penggunaannya; dan penggunaan akhir dari tiap-tiap komoditi, tidak seluruhnya dipakai sebagai konsumsi rumah tangga dan perlu diadakan penyesuaian atas barang-barang yang hilang dan tercecer dalam penyalurannya.
- b. Barang yang mempunyai kegunaan ganda, harus diadakan survei khusus atau kasus untuk mengetahui berapa persen yang digunakan dalam konsumsi rumah tangga.
- c. Apabila tiap komoditi tersebut dinilai atas dasar harga produsen, harus diadakan margin perdagangan dan biaya transport termasuk pajak tidak langsung neto dari pada tiap-tiap komoditi, agar diperoleh nilai atas dasar harga pembeli.
- d. Memperkirakan barang dan jasa lainnya yang juga dikonsumsi oleh rumah tangga.

Penggunaan dengan metode arus barang, menuntut tersedianya data yang lengkap terutama barang yang masuk, baik dari luar



negeri (impor) maupun antar wilayah lewat laut, darat dan udara. Tidak jarang barang yang masuk ke suatu daerah hanya merupakan transit, kemudian keluar lagi menuju daerah lain. Oleh karena data yang menunjang untuk keperluan penghitungan konsumsi ini sangat terbatas, maka metode arus barang ini perlu dilengkapi dengan metode penghitungan lain.

3. Metode Penilaian Harga Eceran

Metode ini dipakai apabila informasi yang ada hanya konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum dari tiap-tiap barang. Nilai dari konsumsi rumah tangga dapat diperoleh dengan jalan mengalikan kuantum barang tersebut dengan harga eceran yang dibayar oleh konsumen terhadap tiap jenis barang.

Kelebihan dari metode ini dibandingkan dengan metode arus barang dan jasa adalah pembelian barang-barang dinilai langsung atas dasar harga beli. Data kuantum yang tersedia mungkin lebih dapat dipercaya daripada nilai yang dikumpulkan. Sebaliknya menghitung harga eceran rata-rata yang dapat dipakai untuk menilai kuantum barang yang dibeli oleh rumah tangga adalah sulit. Hal ini disebabkan tidak tersedianya penimbang yang tepat untuk menimbang harga yang berbeda-beda menurut tempat, kualitas dan sebagainya.

Perkiraan mengenai jumlah barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga dapat bersumber dari data resmi penyediaan dan perubahan stok barang dan jasa, dari serikat-serikat dagang atau hasil-hasil survei pengeluaran konsumsi rumah tangga antara lain konsumsi perkapita Susenas. Data mengenai jumlah penjualan barang yang terkena cukai misalnya minuman keras, rokok, dapat diperoleh dari Dinas Pajak. Dalam penghitungan konsumsi dengan metode ini yang digunakan adalah data Susenas yaitu rata-rata konsumsi perkapita seminggu dalam



kuantum. Untuk mendapatkan nilai konsumsi dipakai rata-rata harga konsumen atau harga eceran yang sudah ditimbang.

4. Metode Penjualan Eceran

Metode ini sama halnya dengan metode langsung, mempunyai kelebihan yaitu dapat mengukur pengeluaran konsumsi rumah tangga pada saat terjadinya pembelian dengan harga yang sesungguhnya dibayar oleh konsumen. Kesulitan dalam menggunakan metode penjualan eceran ini adalah karena pedagang eceran tidak dapat memberikan keterangan secara lebih terperinci mengenai penjualan menurut jenis barang. Pada umumnya perkiraan tahunan dapat diperoleh dengan jalan mengekstrapolasi perkiraan dasar. Indikator-indikator yang dipakai untuk ekstrapolasi diperoleh dari kuesioner-kuesioner yang dikumpulkan secara teratur mengenai penjualan oleh pedagang eceran yang digolongkan menurut jenis usaha utamanya. Indikator semacam ini hanyalah merupakan perkiraan perkembangan dari penjualan barang dan jasa tertentu. Kecenderungan para pedagang eceran yang kurang menghususkan diri dalam menjual berbagai macam jenis barang tanpa mempunyai catatan yang terpisah untuk penjualan setiap jenis barang, akan mengakibatkan indikator-indikator ini kurang dapat dipercaya sebagai alat untuk mengekstrapolasi perkiraan dasar berbagai jenis komoditi.

5. Cara Penghitungan

Metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah gabungan dari metode langsung dan metode penilaian harga eceran. Cara ini dilakukan sehubungan dengan terbatasnya data yang ada. Data yang



paling relevan untuk digunakan adalah dari hasil Susenas, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga. Data ini pun belum dapat dipakai langsung untuk mengestimasi series jumlah pengeluaran rumah tangga, karena data Susenas tidak tersedia setiap tahun, sehingga untuk tahun-tahun selanjutnya diestimasi dengan menggunakan koefisien elastisitas permintaan terhadap pendapatan (*elasticity of demand of income*) untuk kelompok konsumsi makanan dan untuk kelompok pengeluaran non makanan.

a Konsumsi Rumah Tangga Kelompok Makanan

Perkiraan konsumsi untuk kelompok ini digunakan gabungan antara metode langsung dengan metode harga eceran. Artinya konsumsi (kuantum) yang diperoleh dari Survei Rumah Tangga (Susenas) dinilai dengan harga eceran yaitu harga yang dibayar konsumen rumah tangga. Data konsumsi perkapita (kuantum) yang dipakai bersumber dari Susenas dalam bentuk rata-rata konsumsi perkapita dalam seminggu. Konsumsi perkapita sebulan didapatkan dengan cara mengalikan konsumsi perkapita seminggu dengan $30/7$ (1 minggu = 7 hari).

Namun demikian survei Susenas, modul konsumsi tidak selalu dicacah tiap tahun karena survei ini hanya dilakukan 3 (tiga) tahun sekali, maka untuk memperkirakan konsumsi tahun lainnya digunakan analisa regresi silang (*Cross Regression Analysis*). Dalam regresi ini dikaitkan antara variabel pendapatan dengan variabel konsumsi. Dari regresi ini dapat diketahui koefisien elastisitas permintaan yaitu besaran yang menggambarkan perubahan permintaan suatu barang akibat berubahnya pendapatan. Model yang digunakan untuk kelompok makanan adalah Fungsi Eksponensial. Model ini dipilih berdasarkan asumsi bahwa setiap penambahan pendapatan akan menyebabkan pertambahan konsumsi, tetapi pada suatu saat (titik jenuh) konsumsi tersebut mulai menurun, maka bentuk kurvanya seperti parabola.



Bentuk fungsi eksponensial tersebut adalah:

$$\ln a = \frac{\sum(\ln Q) - b \sum(\ln Y_i)}{n}$$

$$Q_i = aY_i^b$$

dimana: Q_i = Rata-rata konsumsi/kapita/sebulan(kuantum)

Y_i = Pendapatan/kapita/sebulan

a = Konstanta

b = Koefisien elastisitas

Sebelum digunakan untuk mengestimasi, terhadap nilai koefisien (b) ini dilakukan pengujian untuk meyakinkan koefisien ini dapat dipakai atau tidak. Syarat yang harus dipenuhi adalah nilai koefisien b harus significant (*highly significant*) dan mempunyai nilai koefisien korelasi (r) yang tinggi atau mendekati 1 (satu).

Untuk menyederhanakan penghitungan persamaan eksponensial $Q_i = a.Y_i^b$ dibentuk dalam persamaan linier dengan melogaritmakannya.

$$Q_i = a.Y_i^b$$

$$\ln Q_i = \ln (aY_i^b)$$

$$\ln Q_i = \ln a + b \ln Y_i$$

$$b = \frac{\sum(\ln Y_i)(\ln Q_i) - \frac{\sum(\ln Y_i) \sum(\ln Q_i)}{n}}{\sum(\ln Y_i)^2 - \frac{\sum(\ln Y_i)^2}{n}}$$

$$Sb^2 = \frac{\sum(\ln Q_i)^2 - \frac{\sum(\ln Q_i)^2}{n} - \frac{\sum(\ln Q_i)(\ln Y_i) - \frac{\sum(\ln Q_i) \sum(\ln Y_i)}{n}}{\sum(\ln Y_i)^2 - \frac{\sum(\ln Y_i)^2}{n}}}{(n-2)\sum(\ln Y_i)^2 - \frac{\sum(\ln Y_i)^2}{n}}$$

$$R^2 = \frac{\sum(\ln Q_i)(\ln Y_i) - \frac{\sum(\ln Q_i)(\ln Y_i)^2}{n}}{\sum(\ln Y_i)^2 - \frac{\sum(\ln Y_i)^2}{n} \sum(\ln Q_i)^2 - \frac{\sum(\ln Q_i)^2}{n}}$$



$t_{\text{tabel}} \cdot \alpha = 10\% ; 5\%$, $a = \text{anti log } a$

$$t_{\text{obs}} = \frac{b}{Sb}$$

Ketentuan nilai b harus *significant/highly significant*, maksudnya adalah sebagai berikut:

$t_{\text{obs.}}(\alpha = 10\% ; \alpha = 5\%) > t(\text{tabel})$ untuk nilai t observasi positif

$t_{\text{obs.}}(\alpha = 10\% ; \alpha = 5\%) < t(\text{tabel})$ untuk nilai t observasi negatif

Catatan

Bentuk hipotesa adalah sebagai berikut:

$H_0 : b = 0$

$H_1 : b \neq 0$

$b = 0$ artinya antara pengeluaran dan konsumsi tidak ada hubungan.

$b \neq 0$ artinya terdapat hubungan antara besarnya pengeluaran dan banyaknya konsumsi.

Koefisien elastisitas (b) yang didapatkan dengan regresi silang tersebut digunakan untuk memperkirakan konsumsi perkapita tahun lainnya atau pada tahun yang tidak ada data Susenasnya. Dengan menggunakan variabel lain yaitu perubahan pendapatan perkapita (atas dasar harga konstan), konsumsi perkapita (data Susenas), maka konsumsi perkapita tahun lainnya dapat diperkirakan.

Formulasinya adalah:

$$C_{(n+1)} = C_n + \{(b)(dpt)(C_n)\}$$

dimana:

$C_{(n+1)}$ = Rata-rata konsumsi (kuantum) perkapita sebulan pada tahun $(n+1)$

C_n = Rata-rata konsumsi (kuantum) perkapita sebulan pada tahun dasar (n) /data Susenas



- dpt = Perubahan pendapatan perkapita harga konstan tahun ke-n dengan tahun ke-(n+1)
- b = Koefisien elastisitas

Perbedaan estimasi konsumsi kelompok makanan dengan kelompok bukan makanan adalah sebagai berikut:

Pertama, untuk kelompok makanan digunakan model regresi Eksponential, sedangkan kelompok bukan makanan dipakai regresi linier. Artinya setiap penambahan pendapatan maka permintaan atas barang konsumsi kelompok makanan akan bertambah, tetapi pada suatu saat akan mencapai titik jenuh, permintaannya akan bergerak turun. Lain halnya permintaan atas kelompok konsumsi bukan makanan, setiap kenaikan pendapatan akan selalu diikuti oleh penambahan permintaan konsumsi kelompok bukan makanan.

Kedua, satuan yang digunakan untuk kelompok makanan adalah kuantum, artinya dalam analisa regresi digunakan hubungan antara pendapatan (Rupiah) dengan konsumsi (kuantum). Untuk kelompok bukan makanan digunakan hubungan pendapatan (Rupiah) dengan konsumsi (Rupiah).

b. Nilai Konsumsi Kelompok Makanan Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan

Konsumsi makanan rumah tangga diperkirakan melalui:

$$C_{(n+1)} = C_n + \{(b)(dpt)(C_n)\}$$

Dengan formulasi tersebut didapatkan konsumsi dalam satuan kuantum, perkapita sebulan. Total konsumsi penduduk akan diperoleh bila dikalikan dengan 12 dan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Untuk memperoleh nilai konsumsi atas dasar harga berlaku dikalikan



dengan harga konsumen atau harga eceran. Harga konsumen atau harga eceran merupakan harga yang dibayar oleh rumah tangga konsumen yang tujuannya untuk dikonsumsi. Harga tersebut merupakan rata-rata harga eceran di kota dengan harga eceran di pedesaan. Konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan didapatkan dengan metode revaluasi, artinya konsumsi dalam satuan kuantum dikalikan dengan harga tetap (tahun dasar) atau harga tahun dasar menurut series PDB atau PDRB.

c. Konsumsi Kelompok Rumah Tangga Bukan Makanan

Perkiraan konsumsi kelompok bukan makanan sama dengan metode kelompok makanan yaitu dengan menghitung koefisien elastisitas (b) dari masing-masing jenis pengeluaran rumah tangga, yaitu regresi linier. Regresi linier tersebut adalah:

$$Q_i = a + b.Y_i$$

dimana : Q = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan

a = konstanta

b = koefisien elastisitas

Y_i = pendapatan perkapita sebulan

Sehingga bentuk formulasinya adalah sebagai berikut:

$$b = \frac{\sum(QY) - \frac{\sum(Y)\sum(Q)}{n}}{\sum(Y)^2 - \frac{\sum(Q)^2}{n}}$$

$$a = \frac{\sum(Q) - b.\sum(Y)}{n}$$

$$Sb^2 = \frac{\sum(Q)^2 - \frac{\sum(Q)^2}{n} - \frac{\sum(Q)Y - \frac{\sum(Q)\sum(Y)^2}{n}}{\sum(Y)^2 - \frac{\sum(Y)^2}{n}}}{(n-2)\sum(Y)^2 - \frac{\sum(Y)^2}{n}}$$



$$R^2 = \frac{\sum(Y)(Q) - \frac{\sum(Y)\sum(Q)^2}{n}}{\sum(Y)^2 - \frac{\sum(Y)^2}{n} \sum(Q)^2 - \frac{\sum(Q)^2}{n}} : r = \sqrt{R^2}$$

t tabel ** = 10% ; 5%

Ketentuan dan bentuk hipotesanya sama seperti pada Elastisitas Konsumsi Makanan.

Kemudian dengan menggunakan formulasi:

$$C_{(n+1)} = C_n + \{(b)(dpt)(C_n)\}$$

diperoleh konsumsi pada tahun ke (n+1).

d. Nilai Konsumsi Kelompok Bukan Makanan Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan

Konsumsi perkapita sebulan atas dasar harga konstan didapatkan dengan cara mendeflate konsumsi perkapita (nilai data Susenas), dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang sesuai dengan jenis pengeluaran barang dan jasa yang dikonsumsi. IHK yang digunakan adalah indeks yang tahun dasarnya telah disesuaikan dengan tahun dasar series PDRB (misalnya tahun 2000). Untuk memperkirakan konsumsi perkapita sebulan di tahun lainnya digunakan formulasi yang sama yaitu:

$$C_{(n+1)} = C_n + \{(b)(dpt)(C_n)\}$$

Seperti halnya yang digunakan dalam kelompok makanan, variabel yang sama dipakai adalah dpt (selisih pendapatan perkapita harga konstan tahun n dengan tahun n+1).

Dengan menggunakan penduduk pertengahan tahun, maka total nilai konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan dapat diestimasi, yaitu dengan mengalikan konsumsi perkapita sebulan atas dasar harga konstan dengan 12 dan jumlah penduduk masing-masing tahunnya.



Nilai konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku didapatkan dengan cara meng"*inflate*"mengalikan total nilai konsumsi atas dasar harga konstan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK). Indeks tersebut adalah sama dengan yang digunakan untuk menginflasi konsumsi perkapita sebulan (Susenas). Estimasi pengeluaran konsumsi rumah tangga belum sepenuhnya memperhitungkan konsumsi dari lembaga nirlaba (LNPR), dikarenakan survei lembaga nirlaba cakupannya masih terbatas.

2.2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR)

Pengeluaran Konsumsi LNPR adalah berbagai pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa oleh lembaga-lembaga sosial yang secara prinsip mempunyai fungsi utama dalam melayani RT. Pengeluaran jenis institusi ini digolongkan sebagai bagian dari pengeluaran akhir untuk tujuan menjaga keberlangsungan usahanya.

2.2.1. Konsep dan Definisi

Lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPR) merupakan satu entitas legal yang secara prinsip terlibat dalam pelayanan/pemberian jasa kepada RT (*non-market*). Seluruh pembiayaan kegiatan lembaga ini bersumber dari sumbangan atau donasi RT, oleh karena itu hampir seluruh aktivitasnya dirancang dan dikontrol oleh RT. Pada umumnya sebagian besar pekerjaannya merupakan tenaga kerja tidak dibayar (*volunteer*).

Lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPR) merupakan bagian dari Lembaga Nonprofit (LNP) secara keseluruhan. Sesuai fungsi dan tugasnya LNP ada yang melayani RT dan ada yang melayani bukan RT, sedangkan yang dimaksud di sini adalah LNP



yang khususnya melayani RT. Dalam *System of National Accounts 1993* (SNA'93), LNPRT dianggap sebagai satu sektor institusi (pelaku ekonomi) tersendiri dalam suatu perekonomian di samping pelaku-pelaku konsumsi akhir lainnya seperti Rumah Tangga, Perusahaan/Bisnis, dan Pemerintahan Umum.

Lembaga Nonprofit yang di dalamnya terdapat LNPRT, secara garis besar menurut sektor kelembagaan dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Klasifikasi Jenis LNP Menurut Sektor Kelembagaan

Kelompok LNP	Jenis LNP	Sektor Kelembagaan
Produsen Jasa Komersial	a. Yang melayani masyarakat umum	Bisnis
	b. Yang melayani kelompok dunia usaha, kecuali yang dibiayai pemerintah	Bisnis
Produsen Jasa Non Komersial	c. Yang dibiayai pemerintah baik keberadaannya terikat maupun tidak	Pemerintah Umum
	d. Yang dibiayai anggota masyarakat dan khusus melayani anggota organisasi	LNPRT
	e. Yang dibiayai anggota masyarakat dan melayani masyarakat umum	LNPRT

Dari penggolongan di atas dapat dilihat bahwa kegiatan Lembaga Nonprofit dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

- a. Lembaga Nonprofit yang menghasilkan jasa layanan komersial

LNP pada kelompok ini adalah lembaga nonprofit yang menjual jasa layanannya pada tingkat harga pasar (komersial), yaitu harga yang didasarkan atas biaya produksi. Jasa yang dihasilkan lembaga ini secara keseluruhan berpengaruh terhadap persediaan



(*supply*) dari jenis jasa tersebut. Bentuk LNP seperti ini dibedakan atas:

- i. LNP yang menyediakan jasa layanannya bagi masyarakat umum seperti lembaga penyelenggara pendidikan dan kesehatan.
 - ii. LNP yang menyediakan jasa layanannya bagi kalangan dunia usaha seperti serikat pekerja, asosiasi bisnis, kamar dagang, dan sebagainya.
- b. Lembaga Nonprofit yang menghasilkan jasa layanan non komersial

Pada kelompok ini adalah LNP yang menjual jasa layanannya pada tingkat di bawah harga pasar (non-komersial), yaitu penentuan harganya tidak didasarkan pada biaya produksi. Bahkan terkadang jasa layanan itu diberikan secara cuma-cuma.

Bentuk LNP seperti ini dibedakan atas:

- i. LNP yang kegiatan pelayanannya sebagian besar dibiayai oleh pemerintah, baik keberadaannya terikat (pada pemerintah) maupun tidak. Contohnya adalah PMI, Komisi Nasional Hak Azasi Manusia, Dharma Wanita, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan sebagainya.
- ii. LNP yang dibentuk dan dibiayai oleh anggota masyarakat. Lembaga ini dengan kata lain disebut Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah tangga (LNPRT). Kemudian lembaga-lembaga yang termasuk sebagai LNPRT dibedakan menjadi:
 - LNP yang menyediakan jasa khusus untuk anggota-anggotanya seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga keagamaan, dan sebagainya.
 - LNP yang menyediakan jasa layanannya bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan seperti LSM, organisasi



sosial, organisasi bantuan kemanusiaan, organisasi pemberi bea siswa, dan sebagainya.

Dengan demikian yang dimaksud dengan LNPRT adalah Lembaga Nonprofit yang menghasilkan jasa sosial kemasyarakatan non komersial dengan dana dari masyarakat atau iuran anggota organisasi (dijual pada tingkat harga di bawah harga pasar) atau dibelikan secara cuma-cuma kepada masyarakat dan anggota organisasi.

Ciri dari kegiatan LNP adalah:

- i. LNP pada umumnya lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui masyarakat.
- ii. Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang mempunyai hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan penting yang diambil lembaga.
- iii. Setiap anggota lembaga mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus. *Profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga.
- iv. Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus.
- v. Istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus usaha melalui kegiatan produktifnya. Surplus usaha yang diperoleh akan diinvestasikan kembali pada kegiatan sejenis.

Lembaga Nonprofit (LNP) sebagai induk dari LNPRT adalah lembaga yang keberadaannya bersifat formal ataupun informal yang dibentuk oleh perorangan, kelompok masyarakat, pemerintah atau oleh dunia usaha, dalam rangka menyediakan jasa sosial kemasyarakatan bagi anggota maupun kelompok masyarakat tertentu tanpa adanya motivasi



untuk meraih keuntungan. Jadi tujuan pembentukannya tidak dimaksudkan untuk memperoleh sumber pendapatan ataupun profit bagi unit yang mengontrol dan membiayainya.

2.2.2. Ruang Lingkup

Lembaga Nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRRT), mencakup 7 (tujuh) bentuk organisasi yaitu: Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS), Organisasi Sosial (ORSOS), Organisasi Profesi (ORPROF), Perkumpulan Sosial/Kebudayaan/Olahraga dan Hobi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Keagamaan, Organisasi Bantuan Kemanusiaan/Beasiswa.

2.2.3. Metodologi

Pengeluaran konsumsi akhir atau biaya-biaya produksi LNPRRT merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut dalam rangka melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, anggota organisasi atau kelompok masyarakat tertentu. Biaya-biaya produksi ini sama dengan nilai konsumsi (antara) barang dan jasa ditambah dengan biaya-biaya primer (upah & gaji pegawai, penyusutan barang modal, dan pajak tak langsung). Biaya produksi yang dicatat adalah nilai yang benar-benar dikeluarkan oleh lembaga atas penggunaan barang/jasa (antara) dan faktor produksi ditambah dengan yang berasal dari produksi sendiri dan pemberian pihak lain (transfer). Jika lembaga menggunakan *input* yang diperoleh secara cuma-cuma (transfer), maka nilainya harus diperkirakan sesuai dengan harga pasar yang berlaku.

Perkiraan pengeluaran akhir konsumsi LNPRRT dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pengeluaran lembaga lain (contoh RT) untuk kegiatan LNPRRT ini.



1. Metode Langsung

Metode Langsung digunakan pada pencacahan secara sampel, di mana nilai yang diperoleh merupakan hasil estimasi terhadap rata-rata sampel.

Yang dihitung adalah *rata-rata biaya layanan per lembaga* yaitu:

$$\bar{x}_i = \frac{\sum_{j=1}^{n_i} x_{ij}}{n_i}$$

Di mana: x_{ij} = nilai biaya layanan untuk lembaga ke j dari bentuk LNPRT kode-i

\bar{x}_i = rata-rata sampel nilai biaya layanan bentuk LNPRT kode-i

n_i = banyaknya sampel bentuk LNPRT kode-i

Jika rata-rata nilai biaya layanan LNPRT per bentuk lembaga (\bar{x}_i) dikalikan dengan populasi bentuk LNPRT kode ke i (N_i), maka akan didapat estimasi nilai konsumsi akhir bentuk LNPRT kode ke i (x_i) atau $x_i = \bar{x}_i \cdot N_i$. Nilai estimasi konsumsi akhir LNPRT merupakan penjumlahan nilai konsumsi akhir seluruh bentuk LNPRT

$$\left(\sum_{i=1}^7 x_i \quad \text{atau} \quad \sum_{i=1}^7 \bar{x}_i \cdot N_i \right)$$

Sedangkan perhitungan biaya layanan LNPRT atas dasar harga konstan dihitung menggunakan bobot Indeks Harga Konsumen untuk masing-masing rincian pengeluaran dengan rumus sebagai

berikut $m_k = \frac{x_k}{a_k}$

di mana: m_k = nilai biaya untuk rincian pengeluaran ke k (atas dasar harga konstan)

X_k = nilai biaya untuk rincian pengeluaran ke k (atas dasar harga berlaku)



$k =$ rincian pengeluaran $= 1,2,\dots,n$

$a_k =$ IHK untuk rincian pengeluaran ke k ,

sehingga total nilai biaya layanan atas dasar harga konstan untuk

masing-masing lembaga adalah $M = \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{a_k}$

Dengan cara penghitungan di atas, maka dapat dihitung nilai biaya layanan atas dasar harga konstan untuk setiap bentuk lembaga sebanyak sampelnya (n_i), sebagai berikut:

$$y_i = \sum_{j=1}^{n_i} M_{ij}$$

di mana: $Y_i =$ nilai konsumsi akhir bentuk LNPRT kode i (atas dasar harga konstan)

$M_{ij} =$ Nilai konsumsi akhir lembaga ke j dari bentuk lembaga kode i

$i =$ kode bentuk lembaga $= 1,2,\dots,7$

$j =$ urutan lembaga dari lembaga kode $i = 1,2,\dots,n_i$

sedangkan nilai total pengeluaran seluruh lembaga atas dasar harga

konstan adalah $\sum_{i=1}^7 Y_i$ atau $\sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{n_i} Y_{ij}$ ($i =$ kode lembaga $=$

$1,2,\dots,7$; $j =$ urutan lembaga dari lembaga kode $i = 1,2,\dots,n_i$).

Nilai total biaya layanan masing-masing bentuk LNPRT atas dasar harga konstan (M_i) dibagi dengan total sampel untuk setiap bentuk

lembaga kode i yang bersangkutan $\left(\overline{M}_i = \frac{M_i}{n_i} \right)$ akan

menghasilkan nilai rata-rata pengeluaran bentuk LNPRT kode i (atas dasar harga konstan). Hasil ini jika dikalikan dengan populasi

masing-masing bentuk lembaga atau $(\overline{M}_i \cdot N_i)$ akan menghasilkan



kode (atas dasar harga konstan). Penjumlahan nilai konsumsi akhir dari seluruh bentuk LNPRT $\left(\sum_{i=1}^7 \overline{M}_i N_i \right)$ adalah konsumsi akhir LNPRT (atas dasar harga konstan).

2. Metode Tidak Langsung

Merupakan pendekatan lain dalam menghitung konsumsi akhir LNPRT. Metode ini memperkenalkan cara menghitung estimasi pendapatan LNPRT (sebagai sumber pembiayaannya) berdasarkan pengeluaran dari lembaga-lembaga lain yang membiayai kegiatan LNPRT tersebut. Caranya adalah dengan menghitung besaran pengeluaran unit-unit atau lembaga-lembaga lain yang menjadi penyumbang (donatur) kegiatan LNPRT tersebut untuk membiayai aktivitasnya. Sebagai contoh: apabila pengeluaran untuk LNPRT adalah sebesar n persen dari total nilai konsumsi rumah tangga maka besaran pendapatan LNPRT adalah n persen dikali dengan total pengeluaran RT (pendekatan pengeluaran). Kemudian untuk menghitung komposisi pengeluaran LNPRT adalah dengan menggunakan rasio-rasio yang berasal dari hasil survei-survei khusus. Dapat diasumsikan penerimaan dianggap sama dengan total pengeluaran.

Untuk mengukur pertumbuhan riil konsumsi LNPRT dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan sebagai berikut:

- i. Metode deflasi yaitu dengan membagi estimasi konsumsi LNPRT atas dasar harga berlaku dengan indeks harga yang sesuai dari masing-masing komponen pengeluaran akhirnya
- ii. Metode rasio pengali tetap atau menaksir penerimaan LNPRT berdasarkan pengeluaran RT, yaitu dengan mengalikan sejumlah rasio (tetap) terhadap nilai konsumsi akhir RT, atas dasar harga konstan



$$Y_{\text{LNPRT}} = r \% \times C_{\text{RT}}$$

di mana: Y_{LNPRT} = Pendapatan LNPRT

$r \%$ = proporsi pengeluaran rumah tangga untuk LNPRT

C_{RT} = pengeluaran konsumsi rumah tangga

Diasumsikan: Pendapatan LNPRT = Konsumsi LNPRT

Sehingga : $Y_{\text{LNPRT}} = (C_{\text{LNPRT}})$

2.2.4. Sumber Data

Data yang dibutuhkan untuk penyusunan penghitungan konsumsi akhir LNPRT diperoleh langsung dari hasil survei khusus. Data tersebut berupa nilai seluruh barang dan jasa yang dikeluarkan oleh lembaga itu sendiri, maupun yang berasal dari transfer pihak lain yang digunakan dalam rangka menghasilkan jasa layanan.

Data pendukung yang dibutuhkan adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) Tahunan untuk masing-masing kelompok pengeluaran yang datanya diperoleh dari Statistik Harga Konsumen. Data ini digunakan untuk menentukan nilai konsumsi akhir LNPRT atas dasar harga konstan.

Untuk melakukan estimasi nilai konsumsi akhir, masih diperlukan data jumlah populasi LNPRT untuk masing-masing bentuk lembaga. Data ini diperoleh dari hasil kegiatan *listing* ke instansi-instansi terkait dan pengecekan langsung ke lapangan.



2.2.5. Keterbatasan dan masalah dalam penghitungan

Masalah yang biasanya ditemukan dalam penghitungan adalah:

- a. Adanya nilai pengeluaran yang sangat besar dibanding dengan nilai yang pada umumnya dikeluarkan. Hal ini terjadi karena masih bercampurnya pengeluaran dari kegiatan jasa yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan jasa layanan, seperti jasa pendidikan dan kesehatan dan kegiatan ekonomis produktif.
- b. Terkadang sulit menentukan bentuk lembaga jika hanya melihat dari lembaga. Suatu lembaga dengan satu nama terkadang bisa melakukan kegiatan lebih dari satu, seperti panti asuhan yatim piatu, bantuan sosial, dan pendidikan. Hal ini sulit dipisahkan karena lembaga tersebut hanya mempunyai satu pembukaan.
- c. Banyak lembaga yang tidak mempunyai pembukuan yang baik dan terinci, sehingga banyak pengeluaran yang ditanyakan sulit untuk dijawab.

2.2.6. Perlakuan khusus

Pada lembaga yang mempunyai lebih dari satu kegiatan pelayanan, sedapat mungkin dipisahkan jenis pengeluarannya untuk masing-masing kegiatan. Pada umumnya masing-masing LNPR ini mempunyai ciri kegiatan yang berbeda yang pada akhirnya mengakibatkan struktur pengeluarannya juga berbeda-beda. Penetapan bentuk lembaga ini ditentukan oleh kegiatan ataupun tujuannya yang paling dominan.



2.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

2.3.1. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi pemerintah didefinisikan sebagai jumlah seluruh pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatannya, yang terdiri dari pembelian barang dan jasa (belanja barang), pembayaran balas jasa pegawai (belanja pegawai), dan penyusutan barang modal, dikurangi dengan hasil penjualan barang dan jasa (output pasar) pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah (yang bukan dikonsumsi oleh pemerintah). Konsumsi pemerintah disebut juga dengan output non-pasar lainnya pemerintah.

Kegiatan pemerintah yang tidak dapat dipisahkan tersebut adalah:

- a. Kegiatan di instansi pemerintah yang memproduksi barang sejenis dengan barang yang dihasilkan oleh perusahaan swasta, dan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan induknya. Contoh: pencetakan publikasi, kartu pos dan reproduksi dari karya seni, pembibitan tanaman dari kebun percobaan, serta lainnya. Penjualan barang-barang ini bersifat insidental dari fungsi pokok lembaga/departemen pemerintah tersebut, dan hasil penjualannya disebut **pendapatan dari barang yang dihasilkan**.
- b. Kegiatan pemerintah yang menghasilkan jasa seperti kegiatan rumah sakit, sekolah, universitas, museum, perpustakaan, tempat-tempat rekreasi dan tempat-tempat penyimpanan hasil karya seni, yang dibiayai dari keuangan pemerintah, dimana pemerintah memungut pembayaran yang pada umumnya tidak mencapai/sesuai dengan besarnya biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima pemerintah dari hasil kegiatan seperti ini disebut **pendapatan dari jasa yang diberikan**.



2.3.2. Ruang Lingkup

Pengeluaran konsumsi pemerintah daerah provinsi mencakup konsumsi seluruh pemerintah desa, konsumsi pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdapat di wilayah pemerintah daerah provinsi yang bersangkutan, konsumsi pemerintah daerah provinsi ditambah dengan konsumsi pemerintah pusat yang merupakan bagian dari konsumsi pemerintah daerah provinsi.

2.3.3. Sumber Data

Dalam penyusunan pengeluaran konsumsi pemerintah, digunakan berbagai macam data seperti:

- a. Untuk pemerintah daerah berupa data Statistik Keuangan Daerah Provinsi (hasil pengolahan daftar Keuangan Daerah Provinsi seluruh Indonesia), Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota (hasil kompilasi dan akumulasi data yang diterima dari Kantor Pemerintah Daerah seluruh Kabupaten/kota), Statistik Keuangan Desa (hasil pengolahan survei yang telah dilaksanakan langsung pada desa/kelurahan terpilih) yang diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan, Direktorat Statistik Keuangan dan Harga, BPS. Data ini memuat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari masing-masing tingkat pemerintahan (Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa). Disamping itu untuk melengkapi data ini, diperoleh juga data dari Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan (DJAPK), Departemen Keuangan.
- b. Data jumlah pegawai negeri sipil yang dirinci menurut status kepegawaian, golongan, departemen/lembaga, dan provinsi yang diperoleh dari BKN (Badan Kepegawaian Negara).



2.3.4. Metodologi

1. Neraca Produksi Pemerintah.

Untuk menghitung pengeluaran konsumsi pemerintah terlebih dahulu harus disusun **neraca produksi pemerintah**, dimana konsumsi pemerintah merupakan salah satu komponennya. Neraca produksi pemerintah, terdiri dari pengeluaran untuk belanja barang/biaya antara, balas jasa pegawai/belanja pegawai dan penyusutan di sisi kiri, serta konsumsi pemerintah (output non pasar lainnya) dan penjualan dari barang dan jasa (output pasar) di sisi kanan. Uraian komponen-komponen neraca produksi pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. **Output** pemerintah terdiri dari, output pasar dan output non pasar lainnya. **Output non pasar lainnya** adalah output yang dihasilkan oleh pemerintah yang dipergunakan sendiri oleh pemerintah atau disebut juga dengan konsumsi pemerintah, yaitu barang dan jasa yang digunakan sendiri sebagai konsumsi akhir oleh pemerintah. Sedangkan **output pasar** pemerintah merupakan penjualan dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah atas dasar harga yang secara ekonomi tidak berarti, kepada institusi lain atau masyarakat.
- b. **Biaya antara** pemerintah adalah pemakaian barang yang tidak tahan lama serta jasa (belanja barang) yang digunakan sebagai input dalam menghasilkan output pemerintah.
- c. **Nilai tambah bruto** pemerintah merupakan penjumlahan dari balas jasa pegawai (belanja pegawai) dan penyusutan. **Balas jasa pegawai** merupakan pembayaran yang diterima pegawai secara langsung sehubungan dengan pekerjaannya, baik dalam bentuk uang maupun barang. Sedangkan **penyusutan** merupakan nilai yang disisihkan sebagai



pengganti susut atau ausnya barang modal pemerintah karena dipakai dalam proses produksi.

Bagan Neraca Produksi Pemerintah dapat dilihat pada diagram berikut ini:

Neraca Produksi Pemerintah

Input	Output
Biaya antara (belanja barang) (A) Nilai tambah bruto (B) = (B1)+(B2) 2.1. Penyusutan (B1) 2.2. Belanja Pegawai (B2)	3. Output (C) 3.1. Pengeluaran konsumsi pemerintah (Output non pasar lainnya) (D) = (C) - (E) 3.2. Penjualan barang dan jasa (Output pasar) (E)
TOTAL INPUT (C) = (A) + (B)	TOTAL OUTPUT (C)

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah atas dasar Harga Berlaku

Telah diterangkan sebelumnya, bahwa nilai konsumsi pemerintah sama dengan total output pemerintah dikurangi dengan nilai barang dan jasa yang dijualnya. Total input merupakan penjumlahan dari biaya antara (belanja barang) dan nilai tambah bruto (belanja pegawai dan penyusutan). Karena di dalam neraca produksi pemerintah, total output sama dengan total input, maka nilai pengeluaran konsumsi pemerintah merupakan pengurangan total output/input dengan penjualan barang dan jasa pemerintah.

Untuk pemerintah daerah, belanja barang dan belanja pegawai diperoleh dari sisi pengeluaran APBD (Provinsi, Kabupaten/Kota) dan desa. Karena datanya belum tersedia, maka penyusutan diperkirakan dua puluh persen terhadap belanja modal. Nilai penjualan barang dan jasa (output pasar) diperoleh dari sisi



penerimaan APBD yang merupakan penerimaan dari bagian pendapatan asli daerah (PAD) rincian pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan adalah jumlah penjualan barang dan jasa pada setiap tingkat pemerintahan yaitu provinsi, kabupaten/kota dan desa (untuk pemerintah desa data tidak tersedia).

Belanja barang, belanja pegawai serta nilai penjualan barang dan jasa pemerintah daerah provinsi; mencakup belanja barang, belanja pegawai serta nilai penjualan barang dan jasa pemerintah desa, pemerintah daerah (kabupaten/kota) yang terdapat di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan, belanja barang dan belanja pegawai serta nilai penjualan barang dan jasa pemerintah daerah provinsi ditambah dengan belanja barang, belanja pegawai serta nilai penjualan barang dan jasa pemerintah pusat yang merupakan bagian dari belanja barang, belanja pegawai serta nilai penjualan barang dan jasa pemerintah daerah provinsi.

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Atas dasar Harga Konstan

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah atas dasar harga konstan merupakan hasil penghitungan komponen-komponen neraca produksi atas dasar harga konstan. Belanja barang (biaya antara) atas dasar harga konstan didapat dengan mendeflasi belanja barang atas dasar harga berlaku dengan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) tanpa ekspor. Sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan didapat dengan mengekstrapolasi nilai tambah bruto pada tahun dasar dengan indeks jumlah pegawai negeri sipil tertimbang menurut golongan kepangkatan. Untuk penjualan barang dan jasa atas dasar harga konstan didapat dengan mempergunakan persentase penjualan



barang dan jasa terhadap output pada harga berlaku.

2.3.5. Perbedaan konsep SNA'68 dengan SNA'93

Pada dasarnya penghitungan pengeluaran konsumsi pemerintah baik menggunakan konsep SNA'68 maupun SNA'93 tidak ada perbedaan. Perbedaannya terletak pada penghitungan output. Pada SNA'93 output pemerintah diuraikan menjadi output pasar, dan output non pasar lainnya. Output pasar pada SNA'68 merupakan penjumlahan dari penerimaan jasa dan nilai produksi berupa barang. Output non pasar lainnya pada SNA'68 sama dengan konsumsi pemerintah, dan merupakan rincian penyeimbang pada neraca produksi pemerintah.

Sedangkan pada SNA '93, rincian penyeimbang pada neraca produksi pemerintah adalah nilai tambah bruto (belanja pegawai ditambah penyusutan). Sementara konsumsi pemerintah dihitung secara langsung dari konsumsi kolektif dan individu pemerintah. Konsumsi individu adalah pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan, kesehatan dan jasa sosial kemasyarakatan lainnya. Konsumsi kolektif adalah pengeluaran pemerintah dalam bidang pemerintahan dan pertahanan yang dinikmati secara bersama (kolektif) atau untuk publik. Selanjutnya pengeluaran konsumsi pemerintah muncul pada neraca penggunaan pendapatan *disposable* dari rangkaian neraca-neraca pada institusi pemerintah menurut SNA'93. Pengeluaran konsumsi pemerintah juga muncul pada neraca barang dan jasa (*account 0*), yaitu neraca pertama pada urutan-urutan neraca dalam SNA'93. Pada neraca ini pengeluaran konsumsi pemerintah tergabung kedalam pengeluaran konsumsi kolektif dan individu aktual (pengeluaran konsumsi individu aktual adalah penjumlahan konsumsi rumah tangga dan konsumsi individu pemerintah). Output non pasar lainnya pada SNA'93 bisa dianggap sama nilainya apabila dihitung menggunakan neraca produksi.



2.4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

2.4.1. Konsep dan Definisi

Secara garis besar definisi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) menurut SNA'68 dan SNA'93 relatif tidak jauh berbeda, namun ruang lingkup PMTB dalam SNA'93 sedikit lebih luas dibanding SNA'68. PMTB didefinisikan sebagai pengeluaran unit produksi untuk menambah aset tetap dikurangi dengan pengurangan aset tetap bekas. Penambahan barang modal meliputi pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal). Pengurangan barang modal meliputi penjualan barang modal (termasuk barang modal yang ditransfer atau barter kepada pihak lain). Diperhitungkannya barang modal bekas dari luar negeri sebagai barang modal baru di dalam negeri, karena nilainya secara ekonomi belum diperhitungkan.

Barang modal juga dapat diartikan sebagai barang atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi secara berulang-ulang dan mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih. Meskipun mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun barang modal tetap mempunyai batasan usia ekonomi yang nilainya diukur melalui proses keausan (susut). Ada 2 (dua) pedoman PMTB, yaitu SNA'68 dan SNA'93. Pada saat ini penghitungan PMTB masih berpedoman pada SNA'68, namun mulai tahun 2001 penghitungan PMTB sudah memasukkan beberapa cakupan pada SNA'93 seperti barang modal tidak berwujud [eksplorasi mineral, perangkat lunak dan hiburan, kesusasteraan dan kesenian asli (*artistic original*)]. Sedangkan yang belum termasuk adalah konstruksi yang belum ada kontrak penjualan baik yang sudah selesai maupun belum selesai dan tanaman yang dapat diambil hasilnya secara berulang-ulang, dan sebagainya.



2.4.2. Ruang Lingkup

PMTB menurut jenis barang terdiri dari:

- i. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) berwujud baik baru maupun bekas yang dirinci menurut jenis aset seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & peralatannya, alat transportasi dan lainnya
- ii. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) tidak berwujud, seperti biaya eksplorasi, *software*, hiburan, kesusasteraan atau benda-benda seni (*artistic original*)
- iii. Perbaikan besar aset berwujud
- iv. Biaya transfer kepemilikan aset, seperti biaya pengacara, arsitek, komisi agen perumahan dan sebagainya.

2.4.3. Sumber data

Data yang dibutuhkan untuk melakukan estimasi pembentukan modal adalah:

- a. Output bangunan dari Sub Direktorat Neraca Industri dan Pertanian
- b. Nilai barang modal impor dari Statistik Impor
- c. Indeks industri dari Statistik IKKR
- d. PDB jasa hiburan, jasa perusahaan dari Neraca Perdagangan & Jasa-jasa
- e. PDB sektor pertambangan & pengalihan
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) dari Statistik Perdagangan Besar
- g. Publikasi Statistik Pertambangan & Pengalihan (Migas & Non



- Migas)
- h. Publikasi Konstruksi (AKI & Non AKI)
- i. Laporan keuangan perusahaan

2.4.4. Metode Estimasi

Estimasi nilai PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung. Pendekatan "langsung" adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi produksi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan "tidak langsung" adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal pada berbagai sektor produksi, atau disebut juga sebagai pendekatan "arus komoditi". Penyediaan atau "supply" barang modal tersebut bisa berasal dari produk dalam negeri maupun produk luar negeri (impor).

a. Pendekatan secara langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi pada setiap sektor kegiatan ekonomi (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga pembelian, yang di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya untuk transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak serta biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang berkaitan dengan pengadaan barang modal tersebut. Dari laporan keuangan perusahaan dapat diperoleh informasi/data tentang pembentukan modal tetap bruto (perubahan atas harta tetap, yang dinilai atas dasar harga berlaku (ADHB) dan harga pembelian (perolehan), pada setiap sektor. Untuk memperoleh



nilai pembentukan modal atas dasar harga konstan, pembentukan modal (ADHB) tersebut di "deflate" dengan menggunakan indeks harga perdagangan besar yang sesuai dengan masing-masing kelompok jenis barang modalnya.

b. Pendekatan secara tidak langsung

Penghitungan pembentukan modal dengan cara tidak langsung disebut juga sebagai pendekatan melalui arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatannya adalah dengan menghitung nilai produk barang yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi (*supply*) yang kemudian dialokasikan sebagian menjadi barang modal. Estimasi penghitungan PMTB berupa bangunan dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai *output* sektor konstruksi, baik atas dasar harga berlaku maupun konstan.

Estimasi penghitungan PMTB berupa mesin, angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi dalam negeri dan yang berasal dari impor. Bagi barang modal yang berasal dari dalam negeri diperoleh dengan dua cara, yaitu pertama dengan mengalokasikan *output* mesin, angkutan serta barang modal lainnya yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan sehingga diperoleh nilai PMTB atas dasar harga pembelian (ADHB). Untuk memperoleh nilai atas dasar harga konstan adalah dengan men"deflate" PMTB (ADHB) dengan IHPB yang sesuai dengan masing-masing jenis barang modal. Pendekatan kedua yang dapat dilakukan apabila data *output* tidak tersedia adalah dengan cara "ekstrapolasi" atau mengalikan nilai harga konstan dengan indeks produksi barang modal yang relevan. Untuk itu estimasi PMTB diawali dengan menghitung nilai harga konstan



terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh nilai berlakunya, nilai (ADHK) tersebut di "reflate" dengan menggunakan indeks harga masing-masing kelompok jenis barang modal sebagai inflatornya. Ini mensyaratkan bahwa nilai harga konstan pada tahun-tahun sebelumnya harus sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan nilai PMTB yang berupa mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya yang berasal dari impor diperoleh melalui 2 (dua) cara.

Pertama nilai PMTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari nilai total barang impor. Lalu barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utamanya seperti mesin-mesin, moda angkutan dan barang modal lainnya. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokatornya (barang modal impor menurut kode SITC 3 digit). *Kedua* untuk memperoleh nilai PMTB (ADHK) tersebut adalah dengan cara men"deflate" estimasi PMTB (ADHB) dengan menggunakan deflator dari indeks harga yang sesuai.

Penghitungan barang modal tidak berwujud seperti eksplorasi mineral ADHB dihitung dengan cara mengalikan suatu rasio terhadap *output* sektor pertambangan, sedangkan untuk mendapat ADHKnya dengan men"deflate" nilai ADHB dengan indeks implisit sektor pertambangan. Perangkat lunak ADHB dihitung dengan cara mengalikan suatu rasio terhadap *output* sektor jasa perusahaan sedangkan untuk mendapat ADHKnya dengan mendeflate nilai ADHB dengan indeks implisit sektor jasa perusahaan. Penghitungan hiburan, kesusasteraan dan kesenian asli dibedakan atas yang berasal dari domestik dan impor. Penghitungan yang berasal dari domestik dengan mengalikan suatu rasio terhadap *output* sektor jasa hiburan, sedangkan untuk yang berasal dari impor dengan cara mengalikan suatu rasio terhadap barang modal impor. Untuk mendapatkan PMTB ADHKnya dengan cara mendeflate nilai ADHB dengan masing-masing indeks harganya, yaitu indeks implisit sektor jasa hiburan dan indeks harga barang impor.



2.5. PERUBAHAN INVENTORI

2.5.1. Konsep dan Definisi

Secara harfiah inventori atau persediaan didefinisikan sebagai produk barang yang tidak atau belum terpakai pada periode pencatatan; sedangkan secara khusus inventori adalah barang yang belum terpakai dalam proses produksi ataupun konsumsi (antara maupun akhir). Inventori ini tersebar di berbagai unit institusi dengan beragam jenis barang inventornya, baik yang dihasilkan sendiri ataupun bukan, baik yang berupa bahan baku & bahan penolong maupun bukan, baik yang berupa barang tahan lama maupun bukan. Bagi pihak produsen yang menghasilkan inventori, produk ini bisa berupa barang yang belum selesai diproses atau belum terjual.

Perlakuan inventori dalam PDRB ini sedikit agak berbeda dengan komponen-komponen penggunaan akhir lainnya. Perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori pada akhir dengan inventori pada awal periode pencatatan. Hal ini yang menyebabkan perubahan inventori bertanda "positif" ataupun "negatif". Bertanda positif apabila nilai inventori pada akhir periode (tahun dan triwulan) lebih besar daripada awal (tahun dan triwulan), atau dengan kata lain telah terjadi penambahan. Sebaliknya apabila inventori bertanda negatif maka terjadi pelepasan atau pengurangan atas barang-barang persediaan. Dengan demikian inventori merupakan satu-satunya komponen PDB yang mempunyai dua tanda, positif atau negatif.

2.5.2. Ruang Lingkup

Yang digolongkan sebagai inventori ini adalah persediaan berbagai jenis produk barang yang akan digunakan dalam proses ekonomi lebih lanjut. Penguasa barang inventori bisa perusahaan, pemerintah, rumah tangga maupun masyarakat. Mengacu pada konsep terbaru dalam Sistem Neraca Nasional (SNA'93), dalam Inventori termasuk



pula benda-benda berharga yang mempunyai nilai ekonomis (*valuable things*).

Klasifikasi Inventori menurut penguasaan dan jenis barang dibedakan atas:

1. Inventori yang dikuasai oleh perusahaan terdiri dari:
 - Barang Jadi (*Finished goods*)
 - Barang setengah jadi (*Work in process goods*)
 - Bahan baku, bahan penolong dan suku cadang (*Supplies and materials*)
2. Stok atau persediaan barang-barang strategis yang dilakukan oleh pemerintah, untuk tujuan menjaga stabilitas politik-ekonomi dalam negeri, seperti beras, gula, gandum, dan kedelai

Dilihat dari produsen yang menghasilkan (sektor lapangan usaha/sektor industri) seperti pada sektor-sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri manufaktur, gas, air bersih dan konstruksi/bangunan, dimana komoditi yang dihasilkannya diantaranya: beras, jagung, kopi, tebu, kopra, kelapa, teh, kayu (log), arang, bambu, ikan beku, udang beku, minyak bumi, batubara, timah, biji besi, makanan jadi, bahan kimia, semen, alat-alat listrik, mesin-mesin, moda angkutan, gas kota, bangunan dan sejenisnya

Lebih jauh inventori dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- i. Barang yang dibeli tetapi belum terpakai untuk proses produksi (Bahan baku, bahan penolong dan suku cadang).
- ii. Barang yang belum selesai dalam proses produksi (*Work in Process*).
- iii. Barang-barang yang belum terjual (yang berada pada pihak produsen atau pedagang).



- iv. Ternak potong seperti sapi, kambing, ayam, dan sebagainya.
- v. Tumbuh-tumbuhan yang sekali tebang (seperti: pinus, bakau dll) dan budidaya perikanan yang semuanya diusahakan dan berada dalam pengawasan. Barang tahan lama (*durable goods*) yang masih dalam proses penyelesaian seperti mesin-mesin, pesawat terbang, kapal laut, kapal penyeberangan dan sejenisnya.

2.5.3. Sumber data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan korporasi dan pendekatan komoditi. Pendekatan korporasi digunakan untuk sektor-sektor antara lain: perdagangan, perhotelan, transportasi, keuangan, dan jasa-jasa. Pendekatan komoditi digunakan untuk sektor-sektor yang data-datanya telah dikumpulkan oleh BPS, seperti: pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, pertambangan, dan industri pengolahan.

Pada pendekatan langsung data mengenai posisi inventori maupun perubahan inventori dapat diperoleh dari laporan perusahaan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang mempunyai sistem pencatatan keuangan yang baik. Sistem yang berbentuk laporan keuangan ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia dimana transaksi tersebut biasanya dicatat dalam Neraca Akhir Tahun (NAT) pada kelompok transaksi harta (aset) lancar.

Sementara penghitungan dengan metode atau pendekatan tidak langsung data inventori ini bisa diperoleh dari pencatatan lembaga-lembaga atau institusi yang berkepentingan seperti departemen terkait, asosiasi sejenis, pemerintah atau pihak lain yang berkepentingan yang datanya antara lain disajikan dalam:

- a. Statistik Perkebunan
- b. Statistik Kehutanan



- c. Publikasi Dirjen Peternakan
- d. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar Sedang
- f. Stok ketahanan pangan (BULOG)
- g. Laporan keuangan perusahaan-perusahaan "Go Public"

Apabila data inventori tersebut tersedia dalam bentuk kuantum (volume) maka harus dicari data tentang harga rata-rata yang sesuai dengan jenis dan kriteria masing-masing inventori tersebut. Apabila data tersedia dalam bentuk nilai, baik posisi maupun perubahannya maka dibutuhkan indeks harga yang akan digunakan sebagai deflatornya. Indeks harga tersebut bersumber dari Indeks implisit harga PDB, IHPB, IHK, ataupun indeks harga lain yang tersedia.

2.5.4. Metodologi

Pada seri pengukuran PDB sebelumnya di mana masih menggunakan konsep SNA'68, perubahan inventori belum diperhitungkan secara khusus yakni dihitung dengan cara residual, atau yang merupakan selisih antara total nilai PDB sektoral dengan total nilai PDB menurut penggunaan. Metodologi yang direkomendasikan untuk digunakan saat ini adalah bisa dengan pendekatan langsung untuk tahun-tahun dimana data telah tersedia (seperti tahun 2003 dan sebelumnya) maupun pendekatan tidak langsung untuk tahun dimana data belum tersedia (seperti data tahun 2004). Penggunaan metode langsung dapat dilakukan dengan dua cara seperti yang telah disebutkan sebelumnya yaitu pendekatan korporasi dan pendekatan komoditi, dimana penggunaannya sesuai dengan ketersediaan data.



a. Pendekatan Korporasi

Dilakukan dengan mencatat perubahan inventori pada unit-unit usaha (perusahaan) yang menguasai inventori, baik yang berupa produk yang dihasilkan sendiri maupun bukan, atau dalam kategori lain seperti produk yang berupa bahan baku, bahan penolong maupun produk (jadi dan setengah jadi) yang dihasilkannya sendiri tetapi belum dipasarkan.

Untuk menghitung nilai perubahan inventori diperlukan data nilai inventori dari dua waktu yang berurutan, pada perusahaan yang sama. Nilai perubahan inventori atas dasar harga konstan dihitung dengan men"deflate" nilai buku atau posisi inventori pada satu waktu dengan Indeks Harga Perdagangan Besar sehingga didapat nilai posisi atas dasar harga konstan (ADHK). Kemudian mengurangkan nilai tersebut dengan nilai posisi inventori ADHK tahun sebelumnya. Sedangkan untuk menghitung nilai perubahan inventori (ADHB) dengan meng"inflate" nilai perubahan inventori ADHK dengan Indeks Harga Perdagangan Besar yang sesuai.

b. Pendekatan Komoditi

Disebut juga sebagai pendekatan arus komoditas. Untuk memperoleh nilai inventori (ADHB) adalah dengan menghitung nilai inventori (volume kali harga) masing-masing pada awal tahun dan nilai inventori pada akhir tahun yang sama. Kemudian selisihnya disebut sebagai perubahan nilai inventori ADHB. Untuk memperoleh estimasi harga konstan (ADHK) adalah dengan mengalikan setiap volume (kuantum) awal dan akhir tahun dengan harga tahun tertentu (misalnya harga tahun 2000), kemudian mengurangkan nilai akhir tahun tersebut dengan nilai awal tahunnya. Atau dengan cara lain dengan men"deflate" nilai inventori (ADHB) dengan indeks harga IHPB atau indeks implisit



PDB yang sesuai dengan kategorinya.

Sedangkan untuk penghitungan digunakan metode revaluasi dan ekstrapolasi. Metode yang pertama digunakan untuk sektor-sektor seperti pertambangan, kehutanan dan peternakan. Sedangkan metode yang kedua digunakan pada sektor-sektor seperti industri pengolahan, perdagangan, jasa-jasa, transportasi, dan keuangan.

Untuk mengestimasi perubahan inventori pada tahun dimana data belum tersedia digunakan penghitungan metode tidak langsung. Caranya adalah dengan menghitung perbandingan atau rasio barang yang belum digunakan lebih lanjut (persediaan) terhadap total produksinya, masing-masing pada awal dan akhir tahun.

Cara Penghitungan:

Penghitungan perubahan inventori menggunakan 3 Metode yaitu

- Metode Revaluasi
- Metode Deflasi
- Metode Ekstrapolasi

2.6. EKSPOR-IMPOR BARANG DAN JASA

2.6.1. Konsep dan definisi

Ekspor barang dan jasa didefinisikan sebagai transaksi ekonomi (berupa penjualan, barter, pemberian berupa hadiah atau hibah) dari residen suatu negara/wilayah kepada non-residen atau pihak luar negeri/wilayah lain. Sedangkan impor barang dan jasa merupakan transaksi ekonomi (berupa pembelian, barter, penerimaan berupa hadiah atau hibah) dari non residen kepada residen suatu negara/wilayah.



2.6.2. Ruang lingkup

a. Ekspor barang dan jasa

Ekspor barang dikategorikan menjadi dua kelompok besar, masing-masing migas dan nonmigas. Ekspor migas dikelompokkan lagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu: a. minyak mentah, b. hasil minyak, dan c. gas. Sedangkan ekspor nonmigas dikelompokkan dalam 3 sektor utama, yaitu: a. hasil pertanian, b. hasil industri, c. hasil tambang dan lainnya

Ekspor jasa terdiri dari: a. pengangkutan lain, b. perjalanan, c. komunikasi, d. konstruksi, e. asuransi, f. keuangan, g, komputer, h. royalti dan lisensi, i. bisnis lainnya, j. perorangan, budaya dsb dan k. pemerintah.

b. Impor barang dan jasa

Impor barang dikategorikan menjadi a. impor barang konsumsi, b. impor bahan baku, dan c. impor barang modal. Sedangkan impor jasa, rinciannya sama seperti ekspor jasa.

2.6.3. Sumber data

a. Ekspor-impor barang:

- Data bulanan ekspor–impor dalam 2 digit HS, BPS (Sub Direktorat Ekspor-Impor)
- Data bulanan ekspor–impor, BPS (Buletin Ringkas Statistik)
- Data bulanan ekspor-impor, BPS (Publikasi Indikator Ekonomi)
- Data bulanan IHPB ekspor-impor, BPS (Sub Direktorat Harga Perdagangan Besar)

b. Ekspor-impor jasa:

- Neraca Pembayaran, Bank Indonesia



- Statistik Kunjungan Tamu Asing, BPS (Sub Direktorat Statistik Pariwisata)
- Statistik Perkembangan Pariwisata, BPS (Buletin Ringkas Statistik)
- Laporan Pengeluaran Penduduk Indonesia ke Luar Negeri, Dep.Kebudayaan & Pariwisata.

c. Untuk Tingkat Regional:

- Publikasi Daerah Dalam Angka, BPS Provinsi
- Matriks Asal Tujuan Barang, Depdiknas dan Lembaga Penelitian ITB
- Data Perdagangan Antar Pulau, Disperindag, SIMOPEL, Adpel

2.6.4. Metodologi

1. Ekspor barang

- a. Estimasi nilai ekspor barang atas dasar harga berlaku adalah melalui data ekspor barang bulanan dari Statistik Ekspor BPS yang nilainya disajikan dalam dolar AS menurut dua digit HS (terinci dalam 99 komoditi).
- b. Nilai ekspor barang dalam dolar AS tersebut disederhanakan menjadi 18 sektor ekonomi. Kemudian dikonversikan ke dalam rupiah dengan cara mengalikan nilai dalam dolar AS tersebut dengan kurs ekspor tertimbang.
- c. Memperkirakan nilai ekspor pembelian langsung. Nilai ekspor pembelian langsung ini dikonversikan pula ke dalam nilai rupiah dengan cara mengalikannya dengan kurs ekspor tertimbang. Kemudian nilai pembelian langsung tersebut ditambahkan pada nilai ekspor barang, diperoleh total ekspor barang atas dasar harga berlaku.



- d. Nilai ekspor barang atas dasar harga konstan diperoleh dengan men"deflate" total nilai ekspor barang atas dasar harga berlaku tersebut dengan menggunakan indeks harga per unit (IHPU) ekspor sebagai deflatornya.

2. Impor barang

- a. Estimasi nilai impor barang atas dasar harga berlaku, pada dasarnya sama dengan cara yang digunakan dalam mengestimasi nilai ekspor barang. Nilai impor barang dinyatakan dalam CIF, sehingga komponen biaya asuransinya harus dikeluarkan karena sudah termasuk dalam impor jasa. Seharusnya biaya pengangkutan juga dikeluarkan sehingga diperoleh nilai impor dalam FOB, tapi hal ini belum dilakukan.
- b. Nilai impor barang dalam dolar AS tersebut dikonversikan ke dalam rupiah dengan cara mengalikan nilai dalam dolar tersebut dengan kurs impor tertimbang.
- c. Nilai impor barang atas dasar harga konstan diperoleh dengan men"deflate" total impor barang atas dasar harga berlaku dengan indeks harga per unit (IHPU) impor.

3. Ekspor-impor jasa

Dilakukan 3 macam estimasi dengan menggunakan analisis runtun waktu, (*decomposition, winter method dan moving average*) untuk melihat range yaitu batas atas, tengah dan batas bawah

Untuk nilai berlaku masih melihat peranan nilai ekspor-impor jasa terhadap barang, di mana rasio ekspor berkisar 8-11 persen sedangkan untuk rasio impor berkisar 26-30 persen.

Untuk deflator ekspor-impor jasa menggunakan deflator yang digunakan pada penghitungan ekspor-impor barang, tapi biasanya



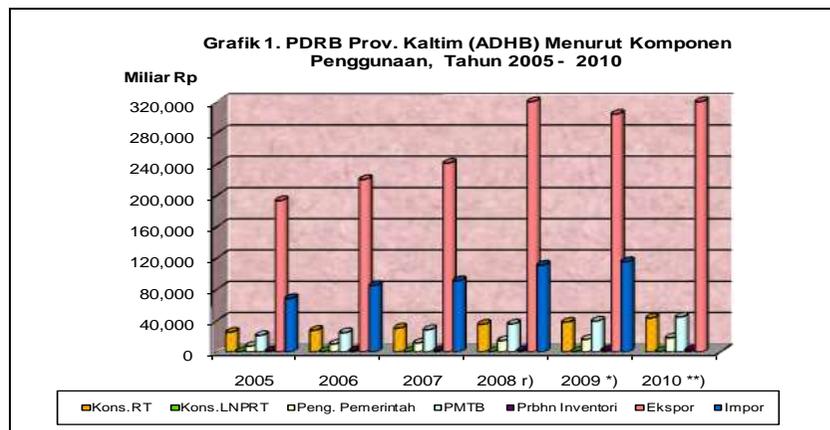
dilihat kembali pertumbuhannya. Untuk ekspor jasa mengikuti pergerakan angka pariwisata, tapi untuk impor jasa belum tersedia datanya sehingga masih melihat pertumbuhan impor barang.

<https://kaltim.bps.go.id>



BAB III TINJAUAN PDRB MENURUT PENGUNAAN

Memasuki tahun 2010, menguatnya harga-harga beberapa komoditas strategis di pasaran dunia, yang kemudian diikuti naiknya harga bahan bakar alternative seperti batubara dan CPO, memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian Kalimantan Timur, sehingga menguntungkan bagi kinerja ekonomi Kalimantan Timur. Sebagai salah satu daerah yang sangat mengandalkan pertumbuhan ekonominya dari sumber daya alam untuk ekspor primer, khususnya migas dan batubara, berdampak pada besaran "kue ekonomi" yang mampu diciptakan di Kalimantan Timur naik secara signifikan. Nilai nominal PDRB Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2010 mencapai 321,0 triliun rupiah yang mana mengalami kenaikan dari kondisi tahun 2009 sebesar 285,0 triliun rupiah. Bila dilihat perkembangannya sejak tahun 2005, terjadi peningkatan 140,7 triliun rupiah atau 43,83 persen. Hal ini merupakan peningkatan terbesar dibanding tahun-tahun sebelumnya atau terjadi sedikit peningkatan dibanding tahun 2008 (134,5 triliun rupiah) atau 42,73 persen. Sementara dalam periode sebelumnya (Tahun 2005-2007) perubahan per tahun hanya pada kisaran di bawah 50 triliun rupiah.



Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur (ADHB) Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2005 – 2010 (Miliar Rp)

Uraian	2005	2006	2007	2008 ¹⁾	2009 ^{*)}	2010 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga	25.161,9	27.507,0	30.290,3	35.220,6	38.001,5	43.185,9
2. Konsumsi LNPRT	365,6	419,9	478,2	571,5	674,5	769,2
3. Konsumsi Pemerintah	7.368,2	10.126,4	11.439,1	14.332,2	15.960,2	17.889,0
4. PMTB	20.886,8	24.429,1	28.331,9	35.639,8	39.242,6	44.543,6
5. Perubahan Inventori	1.344,1	1.516,3	1.712,3	2.027,1	2.321,7	2.604,8
6. Ekspor	193.360,1	220.474,9	241.420,4	338.001,6	304.019,9	350.303,4
7. Impor	68.197,6	84.885,5	91.043,3	110.979,3	115.253,9	138.337,3
Total PDRB	180.289,1	199.588,1	222.628,9	314.813,5	284.966,5	320.958,6

Catatan : ¹⁾ Angka Revisi ^{*)} Angka Sementara ^{**)} Angka Sangat Sementara
net surplus perdagangan tahun 2010:212,0 triliun rupiah

Selain dinilai atas harga berlaku, PDRB Kalimantan Timur menurut komponen penggunaan juga dapat dinyatakan atas dasar harga konstan 2000 (ADHK 2000) atau dengan kata lain berbagai produk dinilai menurut harga yang terjadi pada tahun 2000. Melalui pendekatan tersebut nilai PDRB yang dihitung menggambarkan tentang perubahan PDRB berdasarkan volume atau menjelaskan perubahan atas pengaruh faktor kuantitas saja, tanpa adanya pengaruh harga.

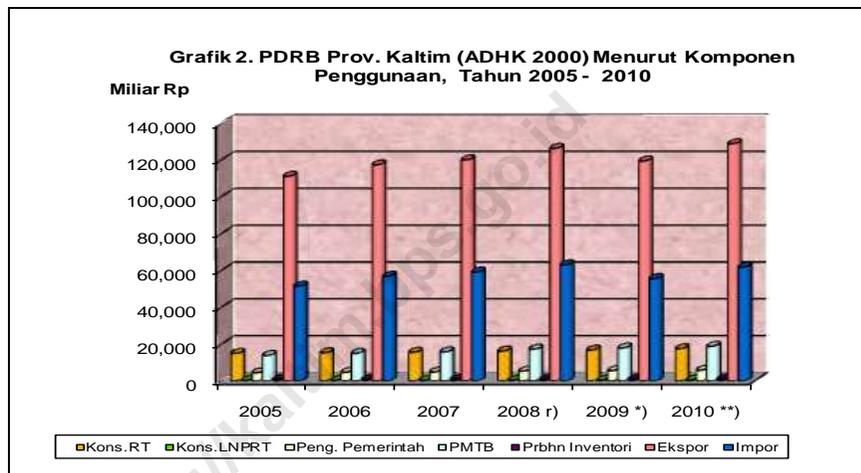
Tabel 2. Produk Domestik Bruto Provinsi Kalimantan Timur (ADHK 2000) Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2005 – 2010 (Miliar Rp)

Uraian	2005	2006	2007	2008 ¹⁾	2009 ^{*)}	2010 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga	14.947,9	15.288,0	15.561,9	16.200,0	16.688,7	17.503,6
2. Konsumsi LNPRT	298,2	322,3	341,0	362,4	409,5	433,0
3. Konsumsi Pemerintah	4.444,1	4.669,2	4.854,4	5.313,9	5.548,7	5.779,2
4. PMTB	13.802,9	14.945,8	15.749,1	17.198,3	17.881,2	18.790,0
5. Perubahan Inventori	880,7	904,2	943,9	1.009,0	1.091,1	1.136,5
6. Ekspor	110.999,7	117.235,2	119.965,4	126.169,4	119.253,3	128.632,1
7. Impor	51.435,5	56.751,9	59.029,2	63.046,1	55.503,7	61.694,5
Total PDRB	93.938,0	96.612,8	98.386,4	103.206,9	105.368,8	110.579,9

Catatan : ¹⁾ Angka Revisi ^{*)} Angka Sementara ^{**)} Angka Sangat Sementara



Selama kurun waktu 2005-2010 PDRB menurut komponen penggunaan atas dasar harga konstan selalu mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2010 besarnya telah mencapai 110,6 triliun rupiah. Perubahan ataupun perkembangan ekonomi secara riil ini, dipicu oleh fenomena membaiknya kinerja konsumsi akhir dari berbagai komponen penggunaan terutama net ekspor Kalimantan Timur yang masih positif.



Terbentuknya nilai PDRB Kalimantan Timur menurut penggunaan secara keseluruhan merupakan kontribusi dari beberapa komponen penggunaan antara lain konsumsi rumahtangga, konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumahtangga (LNPRT), konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori, ekspor (barang dan jasa) dan impor.

Dari keseluruhan nilai PDRB penggunaan di Kalimantan Timur yang paling dominan adalah terutama ditujukan untuk memenuhi keperluan ekspor (109,14 persen) sementara porsi nilai penggunaan produk (barang maupun jasa) asal impor juga relatif besar (43,10 persen), sehingga tren perdagangan Kalimantan Timur tahun 2010 masih menunjukkan posisi "net surplus" sebesar 66,04 persen atau setara 212,0 triliun rupiah. Akan halnya pengeluaran untuk PMTB atau investasi fisik, terlihat peranannya cukup besar yakni 13,88 persen dari total PDRB, kemudian diikuti oleh peran konsumsi

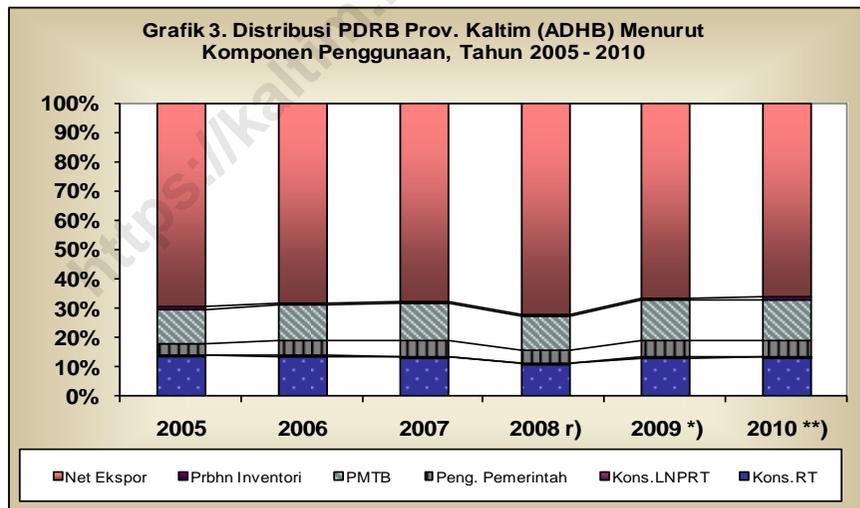


rumah tangga (13,46 persen) lalu konsumsi pemerintah (5,57 persen) sedangkan komponen lain persinya relatif kecil atau kurang dari 1 persen.

Tabel 3. Distribusi Produk Domestik Bruto Provinsi Kalimantan Timur (ADHB) Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2005 – 2010 (Persen)

Uraian	2005	2006	2007	2008 ¹⁾	2009 ¹⁾	2010 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga	13,96	13,78	13,61	11,19	13,34	13,46
2. Konsumsi LNPRT	0,20	0,21	0,21	0,18	0,24	0,24
3. Konsumsi Pemerintah	4,09	5,07	5,14	4,55	5,60	5,57
4. PMTB	11,59	12,24	12,73	11,32	13,77	13,88
5. Perubahan Inventori	0,75	0,76	0,77	0,64	0,81	0,81
6. Ekspor	107,25	110,46	108,44	107,37	106,69	109,14
7. Impor	37,83	42,53	40,89	35,25	40,45	43,10
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan : ¹⁾ Angka Revisi ²⁾ Angka Sementara ³⁾ Angka Sangat Sementara



Gambaran pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur ditunjukkan dengan peningkatan laju PDRB atas dasar harga konstan 2000 setiap tahunnya. Selama periode 2005-2010 terlihat selalu mengalami pertumbuhan positif, meski berfluktuatif. Pada tahun 2005 dan 2010, Kalimantan Timur mengalami laju pertumbuhan ekonomi masing-masing 3,17 persen dan 4,95 persen. Penyebab dari melambat dan menaikinya pertumbuhan ekonomi tersebut erat



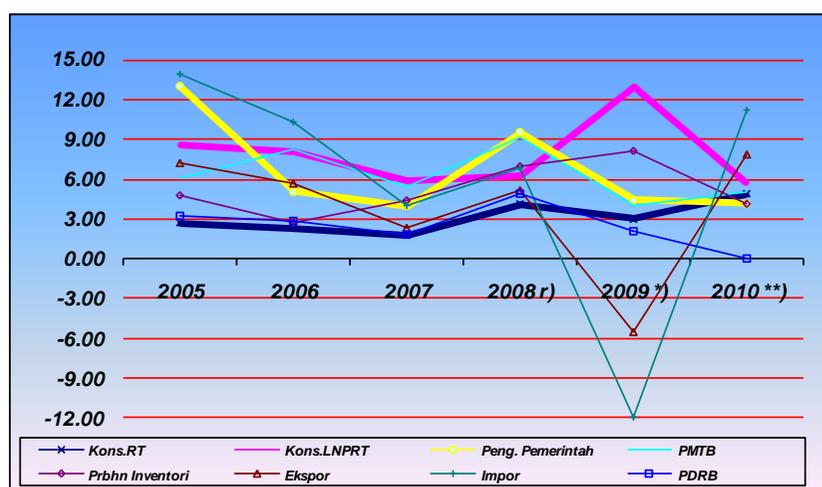
kaitannya dengan kejadian krisis energi atau kenaikan harga migas (BBM) baik ditingkat Internasional hingga ke level nasional pada tahun 2008, dan mengalami penurunan pada tahun 2009, kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2010. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa struktur ekonomi Kalimantan Timur relatif pergeserannya tidak terlihat nyata selama periode tahun 2005-2010, dimana ketergantungan yang tinggi masih ditumpukan pada kinerja ekspor komoditas energi (migas dan batubara).

Tabel 4. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Provinsi Kalimantan Timur (ADHK2000) Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2005 – 2010 (Persen)

Uraian	2005	2006	2007	2008 ¹⁾	2009 ¹⁾	2010 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga	2,67	2,28	1,79	4,10	3,02	4,88
2. Konsumsi LNPR	8,55	8,08	5,80	6,29	12,99	5,73
3. Konsumsi Pemerintah	12,98	5,07	3,97	9,47	4,42	4,15
4. PMTB	6,05	8,28	5,37	9,20	3,97	5,08
6. Ekspor	7,17	5,62	2,33	5,17	- 5,48	7,86
7. Impor	13,93	10,34	4,01	6,80	- 11,96	11,15
Total PDRB	3,17	2,85	1,84	4,90	2,09	4,95

Catatan : ¹⁾ Angka Revisi ^{*)} Angka Sementara ^{**)} Angka Sangat Sementara

Grafik 4. Pertumbuhan PDRB Prov. Kaltim (ADHK 2000) Menurut Komponen Penggunaan, Tahun 2005 – 2010



BAB IV PERKEMBANGAN RINCIAN KOMPONEN PDRB KALIMANTAN TIMUR MENURUT PENGUNAAN TAHUN 2005 – 2010

Perubahan perilaku yang terjadi di tiap-tiap komponen penggunaan akhir selama kurun waktu tertentu amat menentukan bagaimana pola perkembangan struktur ekonomi Kalimantan Timur. Oleh karena tiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya, maka dinamika masing-masing perilaku komponen tersebut akan diuraikan berikut ini.

4.1. Konsumsi Rumahtangga

Sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk Kalimantan Timur setiap tahunnya, nilai pengeluaran konsumsi rumahtangganya juga mengalami peningkatan baik dalam nominal (atas dasar harga berlaku) maupun riil (atas dasar harga konstan). Adapun proporsi penggunaan PDRB untuk memenuhi konsumsi rumah tangga selama periode tahun 2005-2010 terlihat semakin menurun dari semula 13,96 persen di tahun 2005 menjadi 13,46 persen pada tahun 2010. Kondisi ini lebih dikarenakan tingkat perubahan harga maupun konsumsi barang dan jasa oleh rumahtangga tidak secepat perubahan kuantum dan nilai yang terjadi di komponen lainnya.



Tabel 5. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2005 – 2010

Uraian	2005	2006	2007	2008^{*)}	2009^{*)}	2010^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Konsumsi Ruta						
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	25.161,9	27.507,0	30.290,3	35.220,6	38.001,5	43.185,9
b. ADHK 2000 (<i>Miliar Rp</i>)	14.947,9	15.288,0	15.561,9	16.200,0	16.688,7	17.503,6
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	13,96	13,78	13,61	11,19	13,34	13,46
Rata-rata konsumsi per-kapita/tahun (<i>Juta Rp</i>)						
a. ADHB	8,5	9,3	10,2	11,9	12,8	14,6
b. ADHK 2000	5,0	5,0	4,9	4,9	4,9	4,9
Pertumbuhan ¹						
a. Total konsumsi Ruta	2,67	2,28	1,79	4,10	3,02	4,88
b. Perkapita	-2,19	-1,46	-1,92	0,32	-0,72	1,40
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	2.961.574	3.073.849	3.190.106	3.310.474	3.435.081	3.553.143

Catatan : ^{*)} Angka Revisi ^{*)} Angka Sementara ^{**)} Angka Sangat Sementara
¹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2000)

Dilihat secara umum, rata-rata konsumsi per kapita penduduk Kalimantan Timur menurut harga berlaku, selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 rata-rata konsumsi per kapita untuk keperluan makanan dan nonmakanan selama setahun adalah 8,5 juta rupiah kemudian pada tahun 2010 telah meningkat menjadi 14,6 juta rupiah. Apabila pengaruh inflasi dikeluarkan maka rata-rata konsumsi riil per kapita pertahun atas dasar harga konstan 2000 menunjukkan nilai pengeluarannya relatif masih pada kisaran 4,9 juta rupiah pada tahun 2010. Hal ini merefleksikan bahwa tingkat daya beli penduduk Kalimantan Timur masih belum ada peningkatan yang berarti, karena mengalami tekanan akibat dampak luas dari krisis BBM dan penambahan penduduk. Selain itu juga perlu dipahami adalah bahwa nilai rata-rata konsumsi per kapita tersebut, tidak secara otomatis menggambarkan tingkat pemerataan pendapatan tiap individu, karena untuk keperluan tersebut masih perlu dilengkapi dengan data pelengkap lain diantaranya mengenai pola tabungan dan tingkat distribusi penduduk berdasarkan strata ekonominya.



Tabel 6. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2005 – 2010

Uraian	2005	2006	2007¹⁾	2008¹⁾	2009¹⁾	2010^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Struktur Konsumsi Akhir Ruma ²⁾						
a. Makanan (<i>Miliar Rp</i>)	12.605,4	13.702,5	14.991,5	17.282,1	18.823,3	21.024,1
(%)	(50,10)	(49,81)	(49,49)	(49,07)	(49,53)	(48,68)
b. Non Makanan (<i>Miliar Rp</i>)	12.556,5	13.804,5	15.298,8	17.938,5	19.178,2	22.161,8
(%)	(49,90)	(50,19)	(50,51)	(50,93)	(50,47)	(51,32)
Total Konsumsi (<i>Miliar Rp</i>)	25.161,9	27.507,0	30.290,3	35.220,6	38.001,5	43.185,9
(%)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)

Catatan : ¹⁾ Angka Revisi ^{*)} Angka Sementara ^{**)} Angka Sangat Sementara
 2) Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

Apabila ditinjau lebih lanjut mengenai komposisi pengeluaran konsumsi rumahtangga menurut kelompok makanan dan nonmakanan, ternyata pada tahun 2010 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000, relatif tidak berbeda nyata yaitu porsi makanan pada kisaran hampir mencapai 50 persen. Sedangkan porsi nonmakanan hanya sedikit di atas 50 persen. Akan tetapi jika dibandingkan keadaan tahun 2005 lalu ternyata cukup signifikan perubahannya karena porsi terbesar adalah pada pengeluaran untuk kelompok makanan (termasuk makanan jadi) yakni 50,10 persen, dengan demikian selama kurun waktu tahun 2005 – 2010 struktur konsumsi rumahtangga di Kalimantan Timur telah mengalami pergeseran (*shifting*) secara gradual kearah bobot nonmakanan yang semakin besar, ini merupakan indikasi bahwa aktivitas pola konsumsi rumahtangga di Kalimantan Timur makin variatif dan cenderung mencirikan kondisi modern (perkotaan).



4.2. Konsumsi Lembaga Nonprofit Yang Melayani

Rumahtangga (LNPRT)

Proporsi nilai konsumsi LNPRT terhadap PDRB relatif masih kecil yaitu hanya sekitar 0,24 persen setiap tahunnya, namun secara nominal (menurut harga berlaku) perkembangannya terus meningkat dari 365,6 miliar rupiah pada tahun 2005 kemudian menjadi 769,2 miliar rupiah pada tahun 2010. Sumber kenaikan ini cukup banyak, antara lain yang menonjol adalah makin menjamurnya beragam keberadaan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang memberikan perhatian dan bantuan sosial bagi pemberdayaan masyarakat di Kalimantan Timur hingga perkembangan organisasi politik. Pada tahun 2010 pertumbuhan konsumsi LNPRT juga diwarnai oleh nilai konsumsi LNPRT yang ada kaitannya dengan *event* beberapa penyelenggaraan kegiatan PILKADA yang berlangsung di kabupaten/kota dalam wilayah provinsi Kalimantan Timur. Selama periode 2005 – 2010 tampak pertumbuhan riil konsumsi LNPRT selalu berada di atas angka 5 persen, bahkan mencapai puncaknya pada tahun 2009 sebesar 12,99 persen.

Tabel 7. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Tahun 2005 – 2010

Uraian	2005	2006	2007	2008 ^{r)}	2009 ^{*)}	2010 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total konsumsi lembaga non profit						
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	365,6	419,9	478,3	571,5	674,5	769,2
b. ADHK 2000 (<i>Miliar Rp</i>)	298,2	322,3	341,0	362,4	409,5	433,0
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	0,20	0,21	0,21	0,18	0,24	0,24
Pertumbuhan ¹⁾						
Total konsumsi lembaga non profit	8,55	8,08	5,80	6,29	12,99	5,73

Catatan : ^{r)} Angka Revisi ^{*)} Angka Sementara ^{**)} Angka Sangat Sementara
 1) Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2000)



4.3. Konsumsi Pemerintah

Konsumsi akhir pemerintah mencakup berbagai pengeluaran pemerintah (pusat maupun daerah yang dikeluarkan di Kalimantan Timur) dalam penggunaan berbagai produk barang dan jasa, baik dari hasil produksi domestik maupun impor. Pengeluaran pemerintah ini meliputi pengeluaran untuk belanja barang yang habis pakai, belanja pegawai serta penyusutan dari belanja modal (melalui nilai imputasi) yang selanjutnya masih harus dikurangi lagi dengan penerimaan pemerintah yang berasal dari penjualan barang dan jasa.

Tabel 8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Tahun 2005 – 2010

Uraian	2005	2006	2007	2008 ¹⁾	2009 ¹⁾	2010 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total konsumsi Pemerintah						
a. ADHB (Miliar Rp)	7.368,2	10.126,4	11.439,1	14.332,2	15.960,2	17.889,0
b. ADHK 2000 (Miliar Rp)	4.444,1	4.669,2	4.854,4	5.313,9	5.548,7	5.779,2
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	4,09	5,07	5,14	4,56	5,60	5,6
Pertumbuhan ¹⁾ Total konsumsi pemerintah	12,98	5,07	3,97	9,47	4,42	4,15

Catatan : ¹⁾ Angka Revisi ^{*)} Angka Sementara ^{**)} Angka Sangat Sementara
 1) Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2000)

Secara total pengeluaran konsumsi akhir Pemerintah memperlihatkan kenaikan baik menurut harga berlaku maupun harga konstan 2000. Pada tahun 2005 nilai konsumsi pemerintah tercatat 7,4 triliun rupiah kemudian di tahun 2010 menjadi 17,9 triliun rupiah, suatu peningkatan yang sangat besar yakni hampir 143 persen. Dampak dari adanya kebijakan otonomi daerah dalam arti desentralisasi fiskal yang selalu meningkat tiap tahunnya, ditambah aliran dana ke APBD dari bagi hasil sumberdaya alam, menjadikan tingkat konsumsi pemerintah di Kalimantan Timur tergolong cukup tinggi se Indonesia, bahkan untuk sebagian wilayah pemekaran kabupaten baru di Kalimantan Timur peranan konsumsi pemerintah ini amat terasa dalam menggerakkan pertumbuhannya. Meskipun demikian bila dikaitkan



dengan kebutuhan akselerasi pembangunan jangka menengah ekonomi daerah Kalimantan Timur, maka kucuran dana pemerintah ini masih perlu ditambah lagi mengingat luas wilayah Kalimantan Timur yang setara 1,5 kali luas pulau Jawa, amatlah penting untuk segera meningkatkan fungsi pelayanan masyarakat yang tersebar tidak merata, dan sebagian masih tinggal di daerah terpencil maupun perbatasan.

Selanjutnya mencermati perkembangan nilai konsumsi pemerintah berdasarkan harga konstan 2000, yang selalu meningkat tiap tahunnya, juga menggambarkan secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dalam hal bentuk kemajuan kuantitas pelayanan publik walaupun belum mencapai tahap ideal.

4.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

PMTB pada data PDRB menurut penggunaan disini lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi fisik (kapital). Dalam hal ini nilai realisasi investasi merupakan akumulasi dari berbagai aktivitas investasi oleh pihak swasta, pemerintah hingga rumah tangga.

Tabel 9. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2010

Uraian	2005	2006	2007	2008^{r)}	2009^{*)}	2010^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total PMTB						
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	20.886,9	24.429,1	28.331,9	35.639,8	39.242,6	44.543,6
b. ADHK 2000 (<i>Miliar Rp</i>)	13.802,9	14.945,8	15.749,1	17.198,3	17.881,2	18.790,0
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	11,59	12,24	12,73	11,32	13,77	13,88
Pertumbuhan ¹⁾ PMTB	6,05	8,28	5,37	9,20	3,97	5,08

Catatan : ^{r)} Angka Revisi ^{*)} Angka Sementara ^{**)} Angka Sangat Sementara
 1 Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2000)



Perkembangan PMTB atas harga berlaku tahun 2005 hingga tahun 2010 setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2005 tercatat 20,9 triliun rupiah, kemudian di tahun 2010 menjadi 44,5 triliun rupiah atau terjadi peningkatan 4,7 triliun rupiah setiap tahunnya. Peningkatan yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2008, hal ini didorong oleh adanya *event* penyelenggaraan PON ke XVII tahun 2008 di Kalimantan Timur yang turut memacu berbagai pembangunan sarana infrastruktur (konstruksi) sehingga memberi andil terhadap pesatnya pertumbuhan PMTB di tahun tersebut (9,20 persen). Sementara pada tahun 2009, pertumbuhan PMTB Kalimantan Timur berada di titik terendah selama periode 2005 – 2009, hal ini karena tekanan krisis harga BBM dan CPO yang amat memukul kegiatan ekonomi di sektor swasta. Pada sisi investasi pemerintah, karena adanya *event* pemilukada di tahun 2009, juga turut menjelaskan mengapa pertumbuhan PMTB relatif tidak tinggi. Kemudian pada tahun 2010 perekonomian Kalimantan Timur kembali bergairah dengan meningkatnya kembali harga komoditi migas dan batubara, dan juga komoditi unggulan lainnya, sehingga PMTB tumbuh sebesar 5,08 persen.

4.5. Perubahan Inventori

Sesungguhnya komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu menjelaskan aspek perubahan inventori dan besaran diskrepansi statistik. Perubahan inventori merupakan perubahan dalam bentuk “persediaan” atas berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi maupun investasi (kapital). Barang tersebut bisa berupa produk jadi, produk setengah jadi, bahan baku dan penolong, maupun barang strategis pemerintah yang belum terserap oleh pasar.

Berbeda dengan komponen penggunaan lainnya yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis sebatas dari sisi besaran proporsinya saja serta makna tandanya (penambahan atau pengurangan). Perbedaan dalam pendekatan dan tatacara estimasi menyebabkan komponen ini tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana pada komponen lainnya.



Secara umum perubahan inventori ini dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan pada akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 10. Perkembangan Perubahan Inventori Tahun 2005 – 2010

Uraian	2005	2006	2007	2008^{*)}	2009^{*)}	2010^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Nilai Inventori						
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	1.344,1	1.516,3	1.712,3	2.027,1	2.321,7	2.604,8
b. ADHK 2000 (<i>Miliar Rp</i>)	880,7	904,2	943,9	1.009,0	1.091,1	1.136,5
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	0,75	0,76	0,77	0,64	0,81	0,81

Catatan : ^{*)} Angka Revisi ^{*)} Angka Sementara ^{**)} Angka Sangat Sementara

Sejak tahun 2005 hingga tahun 2010 proporsi komponen perubahan inventori terhadap PDRB penggunaan Kalimantan Timur selalu positif dan relatif tidak sampai 1 persen, bahkan memiliki kecenderungan semakin berkurang kecuali tahun 2009 dan 2010, sehingga bisa saja mengindikasikan tren kegiatan ekonomi berjalan semakin kondusif antar tahunnya, namun demikian disadari bahwa tingkat sensitifitas analisis ini masih rendah untuk mengarah pada suatu kesimpulan tertentu, karena faktor keterbatasan ketersediaan dan kontinuitas data yang dapat dihimpun serta sangat beragamnya komoditas barang yang harus dipantau, jadi untuk masa mendatang informasi ini masih perlu disempurnakan.

4.6. Ekspor

Ekspor menggambarkan tentang berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik akan tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk keperluan analisis regional (daerah) kriteria ekspor jadi diperluas; tidak hanya menyangkut faktor luar negeri saja tetapi juga dianggap wilayah diluar



provinsi Kalimantan Timur meskipun masih dalam batas wilayah Indonesia tetap diperlakukan sebagai bagian dari ekspor Kalimantan Timur. Hal sebaliknya berlaku untuk pengertian impor (baik barang dan jasa). Sehingga struktur ekspor dirinci menjadi dua yaitu ekspor antar negara dan ekspor antar provinsi.

Tabel 11. Perkembangan dan Struktur Ekspor , Tahun 2005 – 2010

Uraian	2005	2006	2007	2008¹⁾	2009^{*)}	2010^{**)}
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
Total Nilai Ekspor						
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	193.360,1	220.474,9	241.420,4	338.001,6	304.019,9	350.303,4
b. ADHK 2000 (<i>Miliar Rp</i>)	110.999,7	117.235,2	119.965,4	126.169,4	119.253,3	128.632,1
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	107,25	110,46	108,44	107,37	106,69	109,14
Net Ekspor (<i>Miliar Rp</i>)	125.162,4	135.589,5	150.377,1	227.022,3	188.766,1	211.966,1
Struktur Ekspor ¹						
a. Antar Negara	132.803,3	151.122,6	163.840,4	241.265,1	218.590,1	247.436,6
(%)	(68,68)	(68,54)	(67,87)	(71,38)	(71,90)	(70,63)
b. Antar provinsi	60.556,8	69.352,4	77.580,0	96.736,5	85.429,8	102.866,8
(%)	(31,32)	(31,46)	(32,13)	(28,62)	(28,10)	(29,37)
Total ekspor	193.360,1	220.474,9	241.420,4	338.001,6	304.019,9	350.303,4
(%)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Pertumbuhan ¹						
- Antar Negara	6,81	5,21	0,96	3,32	-6,55	7,30
- Antar Provinsi	8,14	6,70	5,89	9,77	-2,98	9,15
Total ekspor	7,17	5,62	2,33	5,17	-5,48	7,86

Catatan : ¹⁾ Angka Revisi ^{*)} Angka Sementara ^{**)} Angka Sangat Sementara
1 Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2000)

Perkembangan nilai total ekspor Provinsi Kalimantan Timur hampir selalu meningkat tiap tahunnya dan peningkatannya cukup tajam, kecuali pada tahun 2009 yang mengalami penurunan karena turunnya kinerja komoditas migas dan kayu olahan serta metanol (barang kimia). Pada tahun 2010 nilai ekspor Kalimantan Timur mencapai 350,3 triliun rupiah, meningkat jauh di atas periode tahun-tahun sebelumnya. Faktor yang memicu kenaikan ini sebagian besar didominasi oleh meningkatnya kinerja komoditas migas dan



batubara. Sedangkan yang menopang tumbuhnya ekspor di tahun 2010 adalah dari komoditas ekspor non migas, terutama dari batubara yang peningkatan ekspornya cukup lumayan. Sehingga pada tahun 2010, komposisi ekspor barang Kalimantan Timur yang ke luar negeri terjadi *shifting* yakni sedikit lebih tinggi nilai ekspor non migas, melampaui nilai ekspor migasnya. Jadi hal inilah yang memicu meningkatnya pertumbuhan ekspor Kalimantan Timur menjadi 7,86 persen.

Kondisi neraca perdagangan Kalimantan Timur pada tahun 2010 mengalami surplus ekspor sebesar 212,0 triliun rupiah. Hal ini disebabkan oleh potensi sumber daya alam Kalimantan Timur yang amat beragam dan melimpah, sehingga nilai ekspornya jauh di atas nilai impor atau setara dua kali besaran impor per tahun.

4.7. Impor

Sejalan dengan situasi ekonomi tahun 2010, nilai impor barang dan jasa juga mengalami kenaikan yang cukup lumayan. Total impor Kalimantan Timur pada tahun 2010 sebesar 138,4 triliun rupiah, atau tumbuh 11,15 persen. Jenis permintaan impor Kalimantan Timur diantaranya adalah minyak mentah (untuk kilang BBM Balikpapan), mesin dan peralatan barang modal lainnya, bahan baku industri sampai dengan barang-barang konsumsi. Kenaikan barang impor terjadi cukup besar di komponen minyak mentah, baik secara kuantum maupun harga sehingga nilai impor meningkat dibanding tahun 2009.



Tabel 12. Perkembangan dan Struktur Impor Tahun 2005 – 2010

Uraian	2005	2006	2007	2008¹⁾	2009¹⁾	2010²⁾
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
Total Nilai Impor						
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	68.197,6	84.885,5	91.043,3	110.979,3	115.253,8	138.337,4
b. ADHK 2000 (<i>Miliar Rp</i>)	51.435,5	56.751,9	59.029,2	63.046,1	55.503,7	61.694,5
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	37,83	42,53	40,89	35,25	40,44	43,10
Struktur Impor ¹						
A. Antar Negara	37.244,4	48.986,0	49.882,2	63.792,8	62.611,5	75.373,5
(%)	<i>(54,61)</i>	<i>(57,71)</i>	<i>(54,79)</i>	<i>(57,48)</i>	<i>(54,32)</i>	<i>(54,49)</i>
b. Antar Provinsi	30.953,2	35.899,4	41.161,1	47.186,5	52.642,3	62.963,8
(%)	<i>(45,39)</i>	<i>(42,29)</i>	<i>(45,21)</i>	<i>(42,52)</i>	<i>(45,68)</i>	<i>(45,51)</i>
Total impor	68.197,6	84.885,5	91.043,3	110.979,3	115.253,8	138.337,4
(%)	<i>(100,00)</i>	<i>(100,00)</i>	<i>(100,00)</i>	<i>(100,00)</i>	<i>(100,00)</i>	<i>(100,00)</i>
Pertumbuhan ²						
- Antar Negara	22,67	14,31	- 0,60	10,35	-20,25	12,76
- Antar Provinsi	5,17	5,69	9,85	2,74	-1,77	9,55
Total impor	13,93	10,34	4,01	6,80	-11,96	11,15

Catatan : ¹⁾ Angka Revisi ²⁾ Angka Sementara ³⁾ Angka Sangat Sementara

1 Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

2 Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2000)



BAB V AGREGAT PDRB MENURUT PENGGUNAAN DAN PENDAPATAN REGIONAL KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2005-2010

Berdasarkan data PDRB dapat diturunkan berbagai indikator ekonomi makro yang dapat dipakai untuk keperluan analisis deskriptif PDRB serta keterkaitannya dengan variabel sosial ekonomi lainnya.

5.1. PDRB per kapita dan Pendapatan Regional per kapita

PDRB merupakan ukuran "produktivitas" suatu wilayah karena dipakai untuk menjelaskan tentang kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang digambarkan melalui pendekatan nilai tambah. Sementara Pendapatan Regional lebih menggambarkan tentang pendapatan potensial yang diterima seluruh masyarakat dari sumber-sumber penghasilannya yang akan digunakan untuk membiayai kebutuhannya. Adapun proses mendapatkan angka Pendapatan Regional adalah dengan mengurangi PDRB dengan nilai penyusutan dan pajak tak langsung (neto) serta menambahkan besaran selisih pendapatan faktor yang diterima terhadap yang dibayarkan keluar negeri NFI (*net factor income*). Apabila masing-masing PDRB dan Pendapatan Regional Kalimantan Timur dibagi dengan jumlah penduduknya maka akan diperoleh PDRB per kapita dan Pendapatan Regional per Kapita.



Tabel 13. PDRB per kapita dan Pendapatan per kapita Kalimantan Timur Tahun 2005–2010

Uraian	2005	2006	2007	2008 ¹⁾	2009 ¹⁾	2010 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PRDB (ADHB) (Miliar Rp)	180.289,1	199.588,1	222.628,9	314.813,5	284.966,5	320.958,6
Pendapatan Regional (Miliar Rp)	68.714,8	75.982,4	85.514,6	121.133,3	110.008,0	124.591,0
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	60,9	64,9	69,8	95,1	83,0	90,3
Pendapatan Per Kapita (Rupiah)	23,2	24,7	36,6	36,6	32,0	35,1
Jumlah penduduk (000 org)	2.961.574	3.073.849	3.190.106	3.310.474	3.435.081	3.553.143

Catatan : ¹⁾ Angka Revisi ^{*} Angka Sementara ^{**)} Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2010, nilai PDRB per kapita di Kalimantan Timur tidak sebesar kondisi tahun 2008, yakni hanya sebesar 88,9 juta rupiah. Selanjutnya jika didasarkan pada angka Pendapatan per kapita ternyata nilai koreksinya cukup jauh lagi yakni hanya 34,2 juta rupiah saja. Keadaan ini menjelaskan bahwa karena efek dari sifat usaha/bisnis yang berkembang di Kalimantan Timur cenderung berupa usaha padat modal dan sebagian *hi-tech* atau memerlukan keterampilan khusus. Selain itu juga didominasi oleh peran investor yang berasal luar Kalimantan Timur sehingga masih melibatkan campur tangan SDM asing (termasuk pekerja domestik tapi luar Kalimantan Timur). Dampak dari permasalahan dan fenomena tersebut di atas mengakibatkan total NFI di Kalimantan Timur menjadi negatif (sebagai pengurang), hal inilah yang ikut menggerus nilai PDRB per kapita sehingga nilai Pendapatan per kapita turun sekitar 60 persen. Pendapatan per kapita bisa juga dikatakan sebagai bagian dari surplus usaha dan upah gaji yang diterima setiap individu di provinsi Kalimantan Timur.

5.2. Perbandingan Ekspor terhadap PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik tetapi diperdagangkan ke luar negeri. Untuk menghasilkan produk yang diekspor pasti menggunakan kapital atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB),



sementara di sisi lain sebagian dari barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital.

Tabel 14. Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2005 – 2010

Uraian	2005	2006	2007	2008¹⁾	2009^{*)}	2010^{**)}
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
Ekspor (ADHB) <i>(Miliar Rp)</i>	193.360,1	220.474,9	241.420,4	338.001,6	304.019,8	350.303,4
Total PMTB (ADHB) <i>(Miliar Rp)</i>	20.886,9	24.429,1	28.331,9	35.639,8	39.242,6	44.543,6
Rasio Ekspor terhadap PMTB	9,26	9,03	8,52	9,48	7,75	7,86

Catatan : ¹⁾ Angka Revisi ^{)} Angka Sementara ^{**)} Angka Sangat Sementara*

Pada tahun 2010, rasio ekspor terhadap PMTB Kalimantan Timur adalah 7,86. Angka ini relatif kecil dibanding kondisi tahun 2008 yang mencapai 9,48, tetapi lebih besar dibanding tahun 2009 yang angka rasio ekspornya sebesar 7,75. Ini menunjukkan bahwa kinerja ekspor relatif lebih tertekan dibanding tahun 2008, sementara di sisi PMTB juga terjadi perlambatan.

Secara nominal nilai ekspor Kalimantan Timur pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebanyak 46,2 triliun rupiah terhadap tahun 2009. Akan halnya nilai PMTB pada tahun 2010 hanya naik 5,3 triliun rupiah, akan tetapi meningkat dibanding tahun 2009 yang tercatat kenaikannya 3,6 triliun rupiah terhadap tahun 2008.

5.3. Perbandingan PDRB terhadap Ekspor dan Impor

Rasio PDRB terhadap ekspor merupakan gambaran dari besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan seluruh sektor ekonomi di Kalimantan Timur yang diekspor baik ke luar negeri (antar negara) maupun kedalam negeri (antar provinsi), terhadap pembentukan PDRB. Selain itu angka ini menjelaskan



ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan suatu wilayah. Rasio PDRB Kalimantan Timur periode 2005–2010 terhadap ekspor sebesar 0,92. Hal ini menunjukkan bahwa ekspor barang dan jasa Kalimantan Timur, baik ke luar negeri maupun ke dalam negeri sangat dominan, yaitu di atas nilai PDRB Kalimantan Timur selama periode 2005–2010, atau dengan kata lain pembentukan PDRB Kalimantan Timur sangat dipengaruhi/tergantungan pada ekspor.

Di sisi lain rasio PDRB terhadap impor memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh negara atau daerah lain. Besar kecilnya ketergantungan ditunjukkan melalui besaran rasio, apabila angka rasionya besar berarti ketergantungan tidak terlalu kuat, sebaliknya apabila angka rasionya kecil berarti ketergantungan terhadap produk impor semakin besar. Rasio PDRB Kalimantan Timur rata-rata selama periode 2005–2010 terhadap impor sebesar 2,50. Rasio ini akan semakin kecil untuk tahun 2010 yaitu 2,32. Ini mengindikasikan bahwa arus impor makin besar masuk ke Kalimantan Timur, terutama komoditi impor minyak mentah untuk keperluan industri kilang Balikpapan, yang area pemasaran BBMnya menjangkau hingga wilayah Indonesia bagian timur.

Tabel 15. Rasio PDRB terhadap Ekspor dan Impor Tahun 2005 – 2010

Uraian	2005	2006	2007	2008 ¹⁾	2009 ¹⁾	2010 ^{**)}	2005 - 2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
♦ Rasio PDRB terhadap ekspor	0,93	0,91	0,92	0,93	0,94	0,92	0,92
♣ Antar Negara	1,36	1,32	1,36	1,30	1,30	1,30	1,32
♣ Antar Propinsi	2,98	2,88	2,87	3,25	3,34	3,12	3,09
♦ Rasio PDRB terhadap Impor	2,64	2,35	2,45	2,84	2,47	2,32	2,50
♣ Antar Negara	4,84	4,07	4,46	4,93	4,55	4,26	4,51
♣ Antar Propinsi	5,82	5,56	5,41	6,67	5,41	5,10	5,62

Catatan : ¹⁾ Angka Revisi ^{*)} Angka Sementara ^{**)} Angka Sangat Sementara



5.4. Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan

Berdasarkan seri data yang ada dapat ditunjukkan bahwa selama ini ekonomi Provinsi Kalimantan Timur masih selalu ditopang oleh produk-produk yang berasal dari ekspor. Ketergantungan ini dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*) yang selalu menunjukkan ketidakseimbangan tersebut sebagaimana disajikan dalam Tabel 16.

Hal lain yang menarik untuk dicermati adalah bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar daerah, dengan rentang 26 sampai dengan 30 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur baru bisa dipenuhi sekitar 70 persen dari selisih hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus mengalami peningkatan dari sebesar 248.486,7 miliar rupiah (2005). Tahun 2010 permintaan akhir masyarakat sudah mencapai nilai sebesar 459.295,9 miliar rupiah.

Tabel 16 . Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Tahun 2005—2010

Uraian	2005	2006	2007	2008^{*)}	2009^{*)}	2010^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Penyediaan PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	180.289,1 (72,55)	199.588,1 (70,16)	222.628,9 (70,98)	314.813,5 (73,94)	284.966,5 (71,20)	320.958,6 (69,88)
Total nilai Impor ADHB (Miliar Rp)	68.197,7 (27,45)	84.885,5 (29,84)	91.043,3 (29,02)	110.979,3 (26,06)	115.253,8 (28,80)	138.337,4 (30,12)
Total Permintaan Akhir (Miliar Rp)	248.486,7 (100,00)	284.473,6 (100,00)	313.672,2 (100,00)	425.792,8 (100,00)	400.220,3 (100,00)	459.295,9 (100,00)

Catatan : ^{*)} Angka Revisi ^{*)} Angka Sementara ^{**)} Angka Sangat Sementara



Di sisi lain "penyediaan" produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik masing-masing sebesar 180.289,1 miliar rupiah (2005); 199.588,1 miliar rupiah (2006); 222.628,9 miliar rupiah (2007); 314.813,5 miliar rupiah (2008); 284.966,5 miliar rupiah (2009) serta 320.958,6 miliar rupiah (2010). Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan akhir, maka diimpor berbagai produk barang dan jasa dengan nilai masing-masing tahun sebagaimana tertera pada Tabel 16 di atas.

5.5. Neraca Perdagangan (*Trade Balance*)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep selisih antara nilai ekspor dengan nilai impor disebut sebagai "**Ekspor neto**", apabila nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor disebut "**Surplus**", dan sebaliknya disebut "**Defisit**" apabila nilai ekspor lebih kecil dari nilai impor. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk. Sebaliknya kalau posisinya defisit, maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kemajuan ekonomi suatu daerah di antaranya juga ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Rasio di sini tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu), maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu daerah sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

Selama periode 2005—2010 posisi perdagangan barang dan jasa selalu menunjukkan nilai positif yang terus meningkat, atau neraca perdagangan barang dan jasa Provinsi Kalimantan Timur selalu dalam posisi "surplus". Nilai



ekspor yang lebih besar daripada nilai impor menyebabkan adanya aliran devisa masuk, yang dalam konteks berbeda disebut sebagai **"tabungan dari luar provinsi"**. Surplus perdagangan Provinsi Kalimantan Timur yang terjadi tahun 2005 tercatat sebesar 125.162,5 miliar rupiah, dan tahun 2010 mencapai 211.966,0 miliar rupiah. Dengan demikian secara umum surplus perdagangan masih terus menunjukkan adanya peningkatan.

**Tabel 17. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa
Tahun 2005 – 2010**

Uraian	2005	2006	2007	2008^{*)}	2009^{*)}	2010^{**)}
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
Nilai Ekspor (ADHB) <i>(Miliar Rp)</i>	193.360,1	220.475,0	241.420,4	338.001,6	304.019,9	350.303,4
Nilai Impor (ADHB) <i>(Miliar Rp)</i>	68.197,6	84.885,5	91.043,2	110.979,3	115.253,8	138.337,4
Net ekspor (X – M) <i>(Miliar Rp)</i>	125.162,5	135.589,5	150.377,2	227.022,3	188.766,06	211.966,0
Rasio ekspor thdp Impor	2,84	2,60	2,65	3,05	2,64	2,53
Rasio Perdagangan Internasional	0,48	0,44	0,45	0,51	0,45	0,43

Catatan : ^{)} Angka Revisi ^{*)} Angka Sementara ^{**)} Angka Sangat Sementara*

Sementara rasio ekspor terhadap impor meski fluktuatif tapi masih dominan dimana pada tahun 2005 rasionya 2,84 dan tahun 2010 menjadi 2,53. Nilai net ekspor Kalimantan Timur pada tahun 2010 mencapai 212,0 triliun rupiah atau meningkat dibanding kondisi tahun 2009, yang disebabkan faktor fluktuasi harga migas yang naik tajam di tahun 2008, kemudian turun ekstrim di tahun 2009, kemudian meningkat lagi pada tahun 2010.

Selanjutnya Rasio Perdagangan Internasional (RPI) ini menunjukkan perbandingan yang terjadi pada kegiatan perdagangan internasional apakah didominasi oleh ekspor ataukah impor. Formulasinya diperoleh dengan menghitung selisih antara ekspor dan impor dibagi dengan jumlah ekspor dan impor ($[\text{ekspor} - \text{impor}] / [\text{ekspor} + \text{impor}]$). Koefisien RPI berkisar antara -1 sampai dengan +1 ($-1 < \text{RPI} < +1$). Artinya jika RPI berkisar antara



minus 1 maka perdagangan internasional didominasi oleh impor. Namun bila berkisar antara positif 1 maka perdagangan internasional didominasi oleh transaksi ekspor. Menyimak angka RPI pada Tabel 17 memberikan gambaran bahwa perdagangan Provinsi Kalimantan Timur di dominasi oleh kegiatan ekspor.

5.6. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

"**ICOR**" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan tentang nisbah investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan sejumlah investasi tersebut. Secara tepatnya ICOR diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal berbentuk fisik yang dibuat oleh manusia dari berbagai sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang-ulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Salah satu keterkaitan (hubungan) antara PMTB dengan PDRB digambarkan oleh suatu ukuran yang disebut dengan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). Ukuran ini merupakan rasio (perbandingan) antara nilai PMTB dengan nilai pertambahan (peningkatan/penurunan) PDRB pada satu tahun atau periode waktu tertentu di suatu wilayah yang dihitung dengan menggunakan harga konstan 2000.

Dengan menggunakan ukuran rasio ini maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit.

Formula:



$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Dimana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Besaran ICOR Kalimantan Timur selama periode tahun 2005 – 2010 bergerak cukup fluktuatif, namun secara rata-rata adalah 5,34. Hal ini bermakna bahwa untuk menaikkan satu unit *output* dibutuhkan tambahan kapital 5,34 unit. Besaran ICOR ini secara umum sering dipakai sebagai ukuran tingkat produktivitas, atau menunjukkan efisiensi suatu perekonomian dalam penggunaan berbagai barang modalnya. Untuk kondisi tahun 2005 dan 2006, angka ICOR Kalimantan Timur mencapai sekitar 5 – 6, sehingga dapat diartikan perekonomiannya cukup efisien dalam menggunakan barang modalnya. Akan tetapi pada tahun 2007 angka ICOR Kalimantan Timur cukup tinggi yaitu 9,41. Beberapa hal dapat dijelaskan di sini, antara lain bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa laju perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2007 adalah 1,84 persen atau merupakan laju terendah selama 2005 – 2010, penyebab dari kejadian ini lebih dipicu oleh akumulasi tekanan turunnya produksi migas di Kalimantan Timur. Oleh karena kontribusi sektor migas masih dominan terhadap perekonomian Kalimantan Timur, maka kinerja "*output*" secara keseluruhan relatif rendah. Padahal sebenarnya ada beberapa aktivitas lain perkembangannya cukup mengesankan karena produksinya selalu meningkat pesat seperti batubara, perkebunan (sawit) hingga subsektor telekomunikasi. Jadi, bertambahnya kegiatan investasi (PMTB) di tahun 2007 lebih diwarnai oleh maraknya kegiatan investasi pada komoditi unggulan tersebut, khususnya subsektor tambang nonmigas (batubara). Sehingga kontrasnya angka ICOR dapat dimaklumi, dan perkembangannya akan lebih realistis jika diamati dari kinerja investasi



menurut sektor-sektor. Selain itu, perlu dipahami juga bahwa sesungguhnya dampak suatu investasi belum tentu bisa dirasakan hasilnya pada tahun itu juga, artinya membutuhkan *lag* beberapa tahun kemudian. Kondisi inilah yang menyebabkan penafsiran angka ICOR perlu dilakukan secara hati-hati, meskipun pada batas tertentu bisa dimanfaatkan untuk melihat perkembangan kinerja ekonomi secara umum. Pada tahun 2008 angka ICOR Kalimantan Timur sebesar 4,90 dan ini adalah angka ICOR terkecil dan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan hal yang kontras dengan situasi tahun 2007, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa peningkatan output pada tahun 2008 turut didorong oleh gejolak harga pada komoditi andalan Kalimantan Timur yakni migas dan batubara. Selanjutnya, apabila angka ICOR Kalimantan Timur diamati pada tahun 2009, ternyata menunjukkan angka yang cukup tinggi yakni 8,78, sehingga bisa ditafsirkan secara umum kurang efisien investasinya dalam meningkatkan perekonomian Kalimantan Timur. Hal yang paling mencolok bisa dilihat pada sektor migas maupun industri kayu olahan. Kemudian pada tahun 2010 angka ICOR Kalimantan Timur sebesar 3,82 dan ini adalah angka ICOR terkecil setelah tahun 2008. Sebagaimana kondisi tahun 2008 peningkatan output pada tahun 2010 juga didorong oleh gejolak harga pada komoditi andalan Kalimantan Timur yakni migas dan batubara

Tabel 18. ICOR Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2005–2010

Uraian	2005	2006	2007	2008 ¹⁾	2009 *²⁾	2010 **³⁾	2005 - 2010
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
PMTB + Inventori (Milyar Rp.)	14.683,6	15.850,1	16.693,0	18.207,3	18.972,3	19.926,5	104.332,9
SELISIH PDRB (Milyar Rp.)	2.887,6	2.674,8	1.773,5	4.820,5	2.161,9	5.211,1	19.529,5
ICOR	5,09	5,93	9,41	3,78	8,78	3,82	5,34

Catatan : ¹⁾ Angka Revisi ²⁾ Angka Sementara ³⁾ Angka Sangat Sementara



DAFTAR ISTILAH PENTING

Domestik adalah batas teritori kegiatan ekonomi yang hampir mendekati konsep wilayah teritori suatu negara/wilayah/daerah secara hukum (batas administrasi). Merupakan terminologi baku yang digunakan dalam penyusunan statistik neraca nasional yang memberikan batasan jelas tentang wawasan ekonomi penduduk, baik residen maupun non-residen.

Ekspor Barang dan Jasa meliputi seluruh transfer dan penjualan barang dan jasa dari residen (penduduk) suatu negara/wilayah ekonomi domestik ke residen negara/wilayah ekonomi domestik lainnya dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam prakteknya, ekspor terdiri dari barang dagangan dan barang lainnya yang keluar melalui daerah batas pabean atau wilayah domestik suatu negara, termasuk pembelian langsung di negara tersebut oleh perwakilan negara asing dan orang-orang non residen (staf diplomat dan keluarganya). Karena ekspor barang dagangan suatu negara dinilai atas dasar FOB (*free on board*), maka nilai ekspor tidak termasuk pengapalan dan asuransi sampai pada negara tujuan.

Ekonomi domestik adalah berbagai kegiatan ekonomi dalam wilayah domestik suatu negara/wilayah/daerah yang dibedakan dengan luar negeri karena konsep "residen", bukan karena unsur kebangsaan ataupun mata uang. Terdiri dari unit-unit institusi ekonomi yang diselenggarakan oleh residen. Konsep ini tidak selalu identik dengan batas wilayah administrasi secara politik.

Faktor Produksi mencakup faktor-faktor yang terlibat dalam suatu proses produksi baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti: tanah, tenaga kerja, modal dan keahlian.



Faktor Pendapatan dari Luar Negeri merupakan pendapatan/kompensasi yang diterima oleh faktor produksi, atas keterlibatannya dalam suatu produksi di luar batas wilayah domestik.

Harga Berlaku penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tahun sedang berjalan.

Harga Konstan penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tetap di satu tahun dasar.

Impor Barang dan Jasa meliputi seluruh transfer dan pembelian barang dan jasa dari residen suatu negara ke residen negara lainnya dilakukan baik dalam wilayah domestik maupun di luar negeri. Pada prakteknya, impor terdiri dari barang dagangan dan barang lainnya yang melewati batas pabean atau wilayah domestik suatu negara, termasuk pembelian langsung oleh pemerintah, penduduk dan perwakilan negara tersebut di luar negeri. Karena impor barang-barang dagangan dinilai dengan CIF, maka nilai barang termasuk biaya pengangkutan dan asuransi.

Pembentukan Modal Tetap Bruto meliputi pembuatan dan pembelian barang modal baru baik dari dalam negeri maupun impor, termasuk barang modal bekas dari luar negeri. Pembentukan modal tetap yang dicakup hanyalah yang dilakukan oleh sektor-sektor ekonomi di dalam negeri (domestik).

Penyusutan adalah nilai susutnya barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi.

Permintaan Antara merupakan permintaan barang dan jasa untuk memenuhi proses produksi.

Permintaan akhir merupakan permintaan barang dan jasa untuk memenuhi konsumsi akhir, pembentukan modal ekspor.

Produk adalah output (keluaran) yang dihasilkan dari suatu proses produksi yang dilakukan oleh para produsen (residen) di wilayah domestik, pada



satu waktu tertentu. Produk yang dalam istilah lain disebut sebagai komoditi ini menurut sifatnya dibedakan atas produk dalam bentuk barang (*good/tangible*) serta jasa (*service/intangible*).

Produk domestik adalah nilai akhir produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor produksi dalam sistem ekonomi domestik, setelah diperhitungkan dengan nilai barang dan jasa yang berasal dari impor. Total penyediaan produk yang berasal dari produk domestik dan impor disebut sebagai total penyediaan (*supply*).

Residen adalah unit institusi yang mempunyai pusat kegiatan ekonomi 18 dalam batas ekonomi suatu negara (*centre of economic interest*). Peran penting ini ditandai dengan dua faktor penting yaitu tempat tinggal (*dwelling*) dan tempat aktivitas berproduksi dalam jangka waktu yang relatif panjang, biasanya satu tahun. Tujuannya untuk membedakan batas teritori suatu negara terhadap negara-negara lainnya (*rest of the world*). Unit ekonomi yang bukan merupakan residen suatu negara dianggap sebagai sektor luar negeri / asing (non residen).

Tahun Dasar adalah tahun terpilih sebagai referensi statistik, yang digunakan sebagai dasar penghitungan tahun-tahun yang lain. Dengan tahun dasar tersebut dapat digambarkan seri data dengan indikator rinci mengenai perubahan/pergerakan yang terjadi.

Wilayah ekonomi adalah wilayah geografi yang secara administrasi dikelola oleh suatu pemerintahan (negara), dimana manusia, barang dan modal bebas berpindah, yang meliputi wilayah udara, darat dan perairan. Selain itu wilayah ekonomi ini juga mencakup wilayah khusus seperti kedutaan, konsulat dan pangkalan militer, serta zona bebas aktif (lepas pantai).



**Tabel 1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
MENURUT PENGGUNAAN, TAHUN 2005 - 2010** (Jutaan Rupiah)

Jenis Penggunaan	2005	2006	2007	2008 ^{r)}	2009 ⁾	2010 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
HARGA BERLAKU						
1. Konsumsi Rumah Tangga	25 161 861	27 507 005	30 290 326	35 220 600	38 001 501	43 185 888
a. Makanan	12 605 355	13 702 485	14 991 538	17 282 125	18 823 290	21 024 140
b. Non Makanan	12 556 506	13 804 520	15 298 788	17 938 475	19 178 211	22 161 749
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	365 643	419 900	478 250	571 525	674 468	769 179
3. Pengeluaran Pemerintah	7 368 244	10 126 393	11 439 058	14 332 216	15 960 190	17 889 043
4. Pemb. Modal Tetap Domestik Bruto	20 886 840	24 429 059	28 331 855	35 639 765	39 242 630	44 543 631
5. Perubahan Inventori	1 344 089	1 516 282	1 712 282	2 027 082	2 321 650	2 604 761
6. Ekspor	193 360 063	220 474 949	241 420 401	338 001 595	304 019 880	350 303 420
a. Antar Negara	132 803 295	151 122 561	163 840 362	241 265 058	218 590 090	247 436 637
b. Antar Propinsi	60 556 768	69 352 388	77 580 039	96 736 537	85 429 790	102 866 782
7. Impor	68 197 650	84 885 464	91 043 251	110 979 263	115 253 818	138 337 357
a. Antar Negara	37 244 429	48 986 032	49 882 168	63 792 765	62 611 487	75 373 547
b. Antar Propinsi	30 953 221	35 899 432	41 161 083	47 186 498	52 642 331	62 963 811
PDRB Penggunaan	180 289 090	199 588 124	222 628 921	314 813 520	284 966 501	320 958 565
HARGA KONSTAN 2000						
1. Konsumsi Rumah Tangga	14 947 944	15 288 010	15 561 864	16 199 968	16 688 700	17 503 628
a. Makanan	7 467 093	7 596 150	7 633 614	7 969 592	8 295 554	8 574 856
b. Non Makanan	7 480 851	7 691 860	7 928 250	8 230 376	8 393 146	8 928 772
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	298 187	322 271	340 963	362 415	409 496	432 951
3. Pengeluaran Pemerintah	4 444 062	4 669 188	4 854 352	5 313 863	5 548 678	5 779 220
4. Pemb. Modal Tetap Domestik Bruto	13 802 870	14 945 850	15 749 117	17 198 320	17 881 232	18 789 970
5. Perubahan Inventori	880 746	904 233	943 916	1 009 003	1 091 099	1 136 505
6. Ekspor	110 999 722	117 235 233	119 965 405	126 169 417	119 253 286	128 632 082
a. Antar Negara	80 520 266	84 714 198	85 529 796	88 369 246	82 577 731	88 602 363
b. Antar Propinsi	30 479 456	32 521 035	34 435 609	37 800 171	36 675 555	40 029 719
7. Impor	51 435 529	56 751 943	59 029 235	63 046 114	55 503 680	61 694 468
a. Antar Negara	27 726 341	31 693 702	31 502 170	34 763 488	27 723 031	31 260 438
b. Antar Propinsi	23 709 188	25 058 241	27 527 065	28 282 627	27 780 649	30 434 030
PDRB Penggunaan	93 938 002	96 612 842	98 386 382	103 206 871	105 368 811	110 579 888

Catatan : ^{r)} Angka Revisi ⁾ Angka Sementara ^{**)} Angka Sangat Sementara

**Tabel 2. LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR MENURUT PENGGUNAAN
TAHUN 2005 - 2010 (Persen)**

Jenis Penggunaan	2005	2006	2007	2008 ^{r)}	2009 ^{*)}	2010 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
HARGA KONSTAN 2000						
1. Konsumsi Rumah Tangga	2,67	2,28	1,79	4,10	3,02	4,88
a. Makanan	0,25	1,73	0,49	4,40	4,09	3,37
b. Non Makanan	5,20	2,82	3,07	3,81	1,98	6,38
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	8,55	8,08	5,80	6,29	12,99	5,73
3. Pengeluaran Pemerintah	12,98	5,07	3,97	9,47	4,42	4,15
4. Pemb. Modal Tetap Domestik Bruto	6,05	8,28	5,37	9,20	3,97	5,08
5. Perubahan Inventori	4,73	2,67	4,39	6,90	8,14	4,16
6. Ekspor	7,17	5,62	2,33	5,17	-5,48	7,86
a. Antar Negara	6,81	5,21	0,96	3,32	-6,55	7,30
b. Antar Propinsi	8,14	6,70	5,89	9,77	-2,98	9,15
7. Impor	13,93	10,34	4,01	6,80	-11,96	11,15
a. Antar Negara	22,67	14,31	-0,60	10,35	-20,25	12,76
b. Antar Propinsi	5,17	5,69	9,85	2,74	-1,77	9,55
P D R B	3,17	2,85	1,84	4,90	2,09	4,95

Catatan : ^{r)} Angka Revisi ^{*)} Angka Sementara ^{**)} Angka Sangat Sementara

**Tabel 3. DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR MENURUT PENGGUNAAN
TAHUN 2005 - 2010 (Persen)**

Jenis Penggunaan	2005	2006	2007	2008 ^{r)}	2009 ^{*)}	2010 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
HARGA BERLAKU						
1. Konsumsi Rumah Tangga	13,96	13,78	13,61	11,19	13,34	13,46
a. Makanan	6,99	6,87	6,73	5,49	6,61	6,55
b. Non Makanan	6,96	6,92	6,87	5,70	6,73	6,90
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	0,20	0,21	0,21	0,18	0,24	0,24
3. Pengeluaran Pemerintah	4,09	5,07	5,14	4,55	5,60	5,57
4. Pemb. Modal Tetap Domestik Bruto	11,59	12,24	12,73	11,32	13,77	13,88
5. Perubahan Inventori	0,75	0,76	0,77	0,64	0,81	0,81
6. Ekspor	107,25	110,46	108,44	107,37	106,69	109,14
a. Antar Negara	73,66	75,72	73,59	76,64	76,71	77,09
b. Antar Propinsi	33,59	34,75	34,85	30,73	29,98	32,05
7. Impor	37,83	42,53	40,89	35,25	40,44	43,10
a. Antar Negara	20,66	24,54	22,41	20,26	21,97	23,48
b. Antar Propinsi	17,17	17,99	18,49	14,99	18,47	19,62
P D R B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan : ^{r)} Angka Revisi ^{*)} Angka Sementara ^{**)} Angka Sangat Sementara

**Tabel 4. INDEKS PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN MIGAS MENURUT PENGGUNAAN
TAHUN 2005 - 2010 (Tahun 2000 = 100)**

Jenis Penggunaan	2005	2006	2007	2008 ^{r)}	2009 ⁾	2010 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
HARGA BERLAKU						
1. Konsumsi Rumah Tangga	202,31	221,17	243,55	283,19	305,55	347,24
a. Makanan	178,97	194,54	212,84	245,37	267,25	298,49
b. Non Makanan	232,80	255,94	283,64	332,58	355,57	410,89
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	160,65	184,48	210,12	251,10	296,33	337,94
3. Pengeluaran Pemerintah	358,07	492,11	555,90	696,50	775,62	869,35
4. Pemb. Modal Tetap Domestik Bruto	234,50	274,27	318,09	400,14	440,59	500,11
5. Perubahan Inventori	171,25	193,19	218,16	258,27	295,80	331,87
6. Ekspor	210,37	239,87	262,66	367,73	330,76	381,12
a. Antar Negara	192,87	219,47	237,94	350,38	317,45	359,34
b. Antar Propinsi	262,64	300,79	336,47	419,55	370,52	446,14
7. Impor	201,28	250,53	268,71	327,55	340,16	408,29
a. Antar Negara	233,94	307,69	313,32	400,70	393,28	473,44
b. Antar Propinsi	172,33	199,87	229,16	262,71	293,08	350,55
P D R B	218,67	242,08	270,03	381,84	345,64	389,29
HARGA KONSTAN 2000						
1. Konsumsi Rumah Tangga	120,19	122,92	125,12	130,26	134,19	140,74
a. Makanan	106,02	107,85	108,38	113,15	117,78	121,74
b. Non Makanan	138,70	142,61	146,99	152,59	155,61	165,54
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	131,01	141,59	149,80	159,23	179,91	190,22
3. Pengeluaran Pemerintah	215,97	226,91	235,91	258,24	269,65	280,85
4. Pemb. Modal Tetap Domestik Bruto	154,97	167,80	176,82	193,09	200,76	210,96
5. Perubahan Inventori	112,22	115,21	120,26	128,56	139,02	144,80
6. Ekspor	120,76	127,55	130,52	137,27	129,74	139,95
a. Antar Negara	116,94	123,03	124,21	128,34	119,92	128,67
b. Antar Propinsi	132,19	141,05	149,35	163,94	159,07	173,61
7. Impor	151,81	167,50	174,22	186,08	163,81	182,09
a. Antar Negara	174,16	199,08	197,87	218,36	174,14	196,36
b. Antar Propinsi	132,00	139,51	153,26	157,46	154,67	169,44
P D R B	113,94	117,18	119,33	125,18	127,80	134,12

Catatan : ^{r)} Angka Revisi ⁾ Angka Sementara ^{**)} Angka Sangat Sementara

**Tabel 5. INDEKS BERANTAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN MIGAS MENURUT PENGGUNAAN
TAHUN 2005 - 2010 (Tahun Sebelumnya = 100)**

Jenis Penggunaan	2005	2006	2007	2008 ^{r)}	2009 ⁾	2010 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
HARGA BERLAKU						
1. Konsumsi Rumah Tangga	120,29	109,32	110,12	116,28	107,90	113,64
a. Makanan	118,45	108,70	109,41	115,28	108,92	111,69
b. Non Makanan	122,21	109,94	110,82	117,25	106,91	115,56
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	115,94	114,84	113,90	119,50	118,01	114,04
3. Pengeluaran Pemerintah	120,45	137,43	112,96	125,29	111,36	112,09
4. Pemb. Modal Tetap Domestik Bruto	112,98	116,96	115,98	125,79	110,11	113,51
5. Perubahan Inventori	119,59	112,81	112,93	118,38	114,53	112,19
6. Ekspor	139,26	114,02	109,50	140,01	89,95	115,22
a. Antar Negara	138,91	113,79	108,42	147,26	90,60	113,20
b. Antar Propinsi	140,04	114,52	111,86	124,69	88,31	120,41
7. Impor	130,90	124,47	107,25	121,90	103,85	120,03
a. Antar Negara	142,44	131,53	101,83	127,89	98,15	120,38
b. Antar Propinsi	119,26	115,98	114,66	114,64	111,56	119,61
P D R B	134,84	110,70	111,54	141,41	90,52	112,63
HARGA KONSTAN 2000						
1. Konsumsi Rumah Tangga	102,67	102,28	101,79	104,10	103,02	104,88
a. Makanan	100,25	101,73	100,49	104,40	104,09	103,37
b. Non Makanan	105,20	102,82	103,07	103,81	101,98	106,38
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	108,55	108,08	105,80	106,29	112,99	105,73
3. Pengeluaran Pemerintah	112,98	105,07	103,97	109,47	104,42	104,15
4. Pemb. Modal Tetap Domestik Bruto	106,05	108,28	105,37	109,20	103,97	105,08
5. Perubahan Inventori	104,73	102,67	104,39	106,90	108,14	104,16
6. Ekspor	107,17	105,62	102,33	105,17	94,52	107,86
a. Antar Negara	106,81	105,21	100,96	103,32	93,45	107,30
b. Antar Propinsi	108,14	106,70	105,89	109,77	97,02	109,15
7. Impor	113,93	110,34	104,01	106,80	88,04	111,15
a. Antar Negara	122,67	114,31	99,40	110,35	79,75	112,76
b. Antar Propinsi	105,17	105,69	109,85	102,74	98,23	109,55
P D R B	103,17	102,85	101,84	104,90	102,09	104,95

Catatan : ^{r)} Angka Revisi ⁾ Angka Sementara ^{**)} Angka Sangat Sementara

**Tabel 6. INDEKS IMPLISIT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR MENURUT PENGGUNAAN
TAHUN 2005 - 2010 (Harga Berlaku terhadap Harga Konstan)**

Jenis Penggunaan	2005	2006	2007	2008 ¹⁾	2009 ¹⁾	2010 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga	168,33	179,93	194,64	217,41	227,71	246,73
a. Makanan	168,81	180,39	196,39	216,85	226,91	245,18
b. Non Makanan	167,85	179,47	192,97	217,95	228,50	248,21
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	122,62	130,29	140,26	157,70	164,71	177,66
3. Pengeluaran Pemerintah	165,80	216,88	235,65	269,71	287,64	309,54
4. Pemb. Modal Tetap Domestik Bruto	151,32	163,45	179,89	207,23	219,46	237,06
5. Perubahan Inventori	152,61	167,69	181,40	200,90	212,78	229,19
6. Ekspor	174,20	188,06	201,24	267,90	254,94	272,33
a. Antar Negara	164,93	178,39	191,56	273,02	264,71	279,27
b. Antar Propinsi	198,68	213,25	225,29	255,92	232,93	256,98
7. Impor	132,59	149,57	154,23	176,03	207,65	224,23
a. Antar Negara	134,33	154,56	158,35	183,51	225,85	241,11
b. Antar Propinsi	130,55	143,26	149,53	166,84	189,49	206,89
P D R B	191,92	206,59	226,28	305,03	270,45	290,25

Catatan : ¹⁾ Angka Revisi ¹⁾ Angka Sementara ^{**)} Angka Sangat Sementara

**Tabel 7. LAJU PERTUMBUHAN INDEKS IMPLISIT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR MENURUT PENGGUNAAN
TAHUN 2005 - 2010 (Persen)**

Jenis Penggunaan	2005	2006	2007	2008 ¹⁾	2009 ¹⁾	2010 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga	17,17	6,89	8,18	11,70	4,74	8,35
a. Makanan	18,15	6,86	8,87	10,42	4,64	8,05
b. Non Makanan	16,16	6,92	7,52	12,95	4,84	8,62
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	6,80	6,26	7,65	12,43	4,44	7,86
3. Pengeluaran Pemerintah	6,61	30,81	8,65	14,46	6,65	7,61
4. Pemb. Modal Tetap Domestik Bruto	6,54	8,01	10,06	15,19	5,90	8,02
5. Perubahan Inventori	14,19	9,88	8,18	10,75	5,91	7,71
6. Ekspor	29,95	7,96	7,01	33,12	-4,84	6,82
a. Antar Negara	30,06	8,16	7,38	42,52	-3,04	5,50
b. Antar Propinsi	29,49	7,34	5,64	13,59	-8,98	10,32
7. Impor	14,89	12,81	3,12	14,13	17,96	7,98
a. Antar Negara	16,12	15,06	2,45	15,89	23,07	6,76
b. Antar Propinsi	13,40	9,74	4,37	11,58	13,58	9,18
P D R B	30,70	7,64	9,53	34,80	-11,34	7,32

Catatan : ¹⁾ Angka Revisi ²⁾ Angka Sementara